

# IMPLEMENTASI PROGRAM JALUR SUTRA DIGITAL (DIGITAL SILK ROAD) CHINA

# THE IMPLEMENTATION OF CHINA'S DIGITAL SILK ROAD PROGRAM

**SKRIPSI** 

Oleh:

Fanny Cahyani Lailliya 160910101040

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020



# IMPLEMENTASI PROGRAM JALUR SUTRA DIGITAL (DIGITAL SILK ROAD) CHINA

## THE IMPLEMENTATION OF CHINA'S DIGITAL SILK ROAD PROGRAM

#### **SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Fanny Cahyani Lailliya NIM 160910101040

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2020

#### **PERSEMBAHAN**

- Kedua orang tua saya, Papa Tjaruriyono Basuki dan Mama Lilik Kayatun dan Adik Aldi Brilian Ramadhan yang selalu mendukung, mendoakan, serta selalu memberikan doa dan semangat;
- 2) Diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini



#### MOTTO

"what's living without moving"

(Fanny Cahyani Lailliya)

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Cahyani Lailliya

NIM : 160010101040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *Implementasi Program Jalur Sutra Digital (Digital Silk Road) China* adalah benarbenar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Desember 2020 Yang menyatakan,

Fanny Cahyani Lailliya NIM 160910101040

#### **SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI PROGRAM JALUR SUTRA DIGITAL (DIGITAL $SILK\ ROAD$ ) CHINA

# THE IMPLEMENTATION OF CHINA'S DIGITAL SILK ROAD PROGRAM

Oleh:

Fanny Cahyani Lailliya NIM 160910101040

Pembimbing

Dosen Pembimbing I: Agus Trihartono, S.Sos., MA., Ph.D

Dosen Pembimbing II: Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.

#### HALAMAN PERSETUJUAN

# IMPLEMENTASI PROGRAM JALUR SUTRA DIGITAL (DIGITAL SILK ROAD) CHINA

#### **SKRIPSI**

Disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Nama : Fanny Cahyani Lailliya

NIM : 160910101040

Angkatan Tahun : 2016

Daerah Asal : Sidoarjo

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 April 1997

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Agus Trihartono, S.Sos., MA., Ph.D

NIP 196908151995121001

Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.

NIP 197701052008012013

#### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "Implementasi Program Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road*) China" karya Fanny Cahyani Lailliya telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Desember 2020

Waktu : 08.30 WIB-Selesai

Tempat : Sidang Online

Tim Penguji,

Ketua

Drs.Agung Purwanto ,M.Si. NIP 196810221993031002

Anggota I Anggota II

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si. Dr. Sunardi Purwoatmoko, M.IS.

NIP 197212041999031004 NIP 196010151989031002

Mengesahkan,

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

> Dr. Djoko Poernomo, M.Si NIP 196002191987021001

#### **RINGKASAN**

Implementasi Program Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road*) China; Fanny Cahyani Lailliya, 160910101040; 2020: Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada abad ke 21, era globalisasi erat kaitannya dengan dunia digital. Perubahan ini kemudian mengharuskan semua negara untuk bersaing mengembangkan kemampuan teknologi berkualitas tinggi. Hal ini bertujuan agar negara tersebut mampu bersaing di pasar internasional. China adalah salah satu negara yang menjadi perhatian dunia karena pertumbuhan teknologi digitalnya yang pesat. Pada tahun 2015, China meluncurkan strategi industri digital yang ambisius yaitu "China's Digital Silk Road" melalui strategi ini China berupaya untuk memajukan sektor industri digitalnya dengan memasuki Revolusi Industri ke-4 atau Revolusi Industri 4.0, dan menjadi salah satu negara industri digital kuat di dunia.

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan implementasi *China's Digital Silk Road* terutama pada bidang produksi serta teknologi-teknologi digital yang dimanfaatkan, dan memberikan gambaran umum mengenai pertumbuhan digitalisasi China serta karakteristiknya dari tahun 2015 hingga dengan Desember 2019. Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai literasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dianalisis. Literasi tersebut berupa buku (cetak ataupun *e-book*), artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

Penulis berhasil menemukan bahwa implementasi *China's Digital Silk Road* dijalankan di bawah dorongan kuat dari China melalui perencanaan yang jeli dari China dalam melakukan pengalokasian sumber daya baik itu modal maupun manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan modal, ketenagakerjaan, sebuah industri baru bisa berkembang semakin depan dan menjadi semakin kuat, dan dukungan dari perusahaan telekomunikasi lokal seperti Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei dan ZTE, China menjadi percaya diri untuk terus berinovasi dan bersaing dalam pasar internasional.

#### **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road*) China" guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama kepada:

- 1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
- 2. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 3. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
- 4. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sebagai almamater tempat penulis menuntut ilmu;
- 5. Agus Trihartono, S.Sos., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing utama yang selalu memberi masukan, pengetahuan baru, serta semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
- 6. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, memberi masukan dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
- 7. Drs.Agung Purwanto ,M.Si., selaku dosen ketua penguji, Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji I dan Dr. Sunardi Purwoatmoko, M.IS. selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membagi ilmu pengetahuan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
- 8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama belajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 9. Kedua orang tua tercinta, Ibu Lilik Kayatun dan Bapak Tjaturiyono Basuki, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan do'a;
- 10. Adikku Aldi Brilian Ramadhan yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi teladan yang baik;

- 12. Suhuu Fikry dan Bapak Stev yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan referensi untuk skripsi ini;
- 13. Rekan Geng Pasar Kembang Gg.10 Vira Vita Verina, Bela Maya Nurjannah, Fauziah Al-Hibryah,Tri Restuningtyas, Yeni Herdiyanti, Ratih Amelia, Ratika Anjani,Yudith Ayu, Maulfa A. Handini, Bagus Aldi yang setia menemani selama di Jember;
- 14. Ketintang Squad Firdausy Anindita, M. Rasich Nabil Adis, Dinda Lestari Proboningrum yang selalu menjadi tempat diskusi dan berbagi ilmu;
- 15. Teman Terindah Grahita Dwi, Izzah Khairu Rahmah dan Sri Putri yang menjadi teman berbagi cerita semenjak SMP;
- 16. Majelis Al-Ghibahi Adityani Diki Sugiarto, Dini Irmaningtyas. Bang Valentino Febrianto yang selalu memberikan semangat dan menjadi teman diskusi kritis tentang kehidupan;
- 17. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya angkatan 2016;
- 18. Kawan-kawan HIMAHI 2017 dan BEM FISIP UNEJ 2019
- 19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya penelitian yang mampu melanjutkan dengan metode yang berbeda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan digitalisasi di Indonesia

Jember, 2020

Penulis

#### DAFTAR ISI

Halaman
PERSEMBAHANi
MOTTOii
PERNYATAANiii
SKRIPSIiv
HALAMAN PERSETUJUANv
PENGESAHANvi
RINGKASANvii
PRAKATA viii
DAFTAR ISIx
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR DIAGRAMxiv
DAFTAR TABELxv
BAB 1 PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan7
1.2.1 Batasan Materi7
1.2.2 Batasan Waktu8
1.3 Rumusan Masalah8
1.4 Tujuan Penelitian9
1.5 Kerangka Konseptual9
1.5.1 Ekonomi Politik Internasional10
1.5.2 Structural Power12

1.6 Argumen utama	18
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7.2 Teknik Analisis Data	19
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 KEBANGKITAN EKONOMI CHINA	22
2.1 Kondisi Ekonomi China Sebelum dan Sesudah E Reformasi Ekonomi	
2.2 Kebangkitan Ekonomi China di Era Xi Jinping	
2.3 Prinsip Kerjasama China Dengan Negara Mitra BRI	32
2.4 Lembaga Penyedia Dana Bagi BRI	34
2.4.1 China Export and Import Bank (Exim bank)	34
2.4.2 China Development Bank (CDB)	35
2.4.3 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	36
2.4.4 Silk Road Fund (SRF)	37
2.5 Penutup	
BAB 3 DIGITAL SILK ROAD	39
3.1 Perkembangan Industri dan Teknologi China	39
3.2 Ambisi Digital China	40
3.3 Digital Silk Road	42
3.3.1 Tujuan China dalam Digital Silk Road	47
3.3.2 Penelitian dan Pengembangan (Research a Development, R&D)	
3.3.3 Perusahaan Telekomunikasi Mitra DSR	52
2.4 D 4	<b>5 4</b>

BAB 4 IMPLEMENTASI CHINA'S DIGITAL SILK ROAD	.55
4.1 Implementasi Digital Silk Road Melalui Structural Power	.55
4.1.1 Security Structure	.57
4.1.2 Production Structure	.62
4.1.3 Finance Structure	.72
4.1.4 Knowledge Structure	.74
4.2 Analisis Implementasi Digital Silk Road	.74
4.3 Dampak Digital Silk Road	.81
4.4 Penutup	.83
BAB 5 KESIMPULAN	.84
DAFTAR PUSTAKA	.87
LAMPIRAN	102

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Jalur Koridor BRI	31
Gambar 3.1 Garis waktu inisiasi DSR	47



### DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Structural Power	575
Diagram 4.2 Struktur Koordinasi Kebijakan Digital China	70



### DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Implementasi <i>E-Commerce</i>	. 70
Tabel 4.2 Implementasi Smart City	. 71



#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan global saat ini ditandai dengan kebangkitan China (*the rising of China*) sebagai salah satu negara yang mampu menggeser kekuatan hegemoni dunia. Indikator yang menjadikan China semakin dominan di tatanan global ini dapat dilihat dari peningkatan kerjasama ekonomi dan pengaruh politik serta militernya secara global. Dalam satu dekade terakhir China dipandang mampu mengungguli Amerika Serikat dalam tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB atau Gross Domestic Bruto, GDP). Hal ini dapat terlihat pada tahun 2018 pertumbuhan PDB Amerika Serikat hanya mencapai 2.3%, terpaut jauh dengan China yang mampu meningkatkan PDB hingga 6.1% (World Bank, 2020b). Pada tahun 2019 PDB China setara dengan USD 14.14 Triliun. Lembaga Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*, IMF) memproyeksikan tingkat pertumbuhan PDB China pada tahun 2023 akan naik sebesar 5,6% (Silver, 2020).

Pemasukan ekonomi utama dari China dapat kita lihat dari pesatnya pertumbuhan di bidang industri dan teknologi. Dari segi industri, China menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil berbagai bahan baku untuk proses industrialisasi di berbagai belahan dunia. Sedangkan dari bidang teknologi, China mampu menjadi negara yang berhasil memproduksi perangkat telekomunikasi dan internet lokal secara masif (Hao, 2019a). Tingginya tingkat produktivitas barang ini kemudian berdampak pada ekspansi perdagangan yang luas. Hal inilah yang menyebabkan produk China banyak tersebar dan diminati di berbagai penjuru dunia. Selain harganya yang lebih terjangkau dan China juga memproduksi berbagai varian. Dengan demikian upaya China untuk menjadi salah satu negara kekuatan utama (great power) semakin terbuka lebar.

Berbagai macam strategi untuk mendongkrak perekonomian dan mengupayakan ekspansi kekuatan ekonomi China di kancah internasional mulai

terlihat dari kepemimpinan Mao Zedong yang mulai terbuka dengan kerjasama internasional. Upaya ekspansi ekonomi ini kemudian diteruskan oleh Deng Xiaoping yang berusaha untuk melakukan restrukturisasi pola isolasi ekonomi pada pemerintahan Mao.

Pada masa pemerintahan Hu Jintao proses industrialisasi semakin tinggi. Implikasinya, China mulai merambah kawasan Amerika Latin dan Afrika. Hal ini bertujuan untuk mencari bahan bakar demi kepentingan keamanan energi berupa minyak, batubara dan sumber daya alamnya (Willy Lam, 2016). Diplomasi Hu Jintao ini kemudian populer dengan istilah diplomasi energi. Melanjutkan ekspansi ekonomi masa pemerintahan Hu Jintao, Xi Jinping berupaya untuk mewujudkan China sebagai negara adidaya atau dikenal dengan istilah "Chinese Dream" (BBC NEWS, 2012). Xi Jinping menggunakan soft power dan hard power-nya untuk mempererat kerjasama ekonomi China dengan dunia global. Strategi ini berupa pembangunan infrastruktur dan pinjaman uang. Pada tahun 2013 proyek ambisius ini lahir dan yang kemudian disebut Satu Sabuk dan Satu Jalur (One Belt and One Road, OBOR).

Setelah dua tahun berjalan, Xi Jinping kemudian melakukan restrukturisasi proyek OBOR menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2015. Melalui investasi dan pembangunan infrastruktur ini China bertujuan untuk menyebarkan pengaruhnya di luar negeri. China berupaya untuk menjadi negara dominan secara regional dan menjadi negara adidaya secara global. Dalam perjalanannya BRI tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. China juga menyadari di era globalisasi, sektor teknologi akan terintegrasikan dengan proses digitalisasi. Pada tahun 2015, China meluncurkan kebijakan "*Made in China 2025*" (Sun, 2018). Kebijakan ini mengupayakan China agar menjadi pabrik perusahaan dunia yang berteknologi tinggi. Serta menjadi strategi China untuk memperluas pasar teknologinya. Hal ini kemudian dipertegas dengan pidato Xi Jinping pada 14 Mei 2017 saat menghadiri Forum Kerjasama Internasional Belt and Road di Beijing. Xi Jinping mengusulkan untuk mempromosikan pusat data, komputasi awan dan pembangunan kota pintar yang terhubung pada jalur sutra digital abad ke-21.

Untuk pertama kalinya gagasan tentang digitalisasi ini dikenal dengan istilah *Information Silk Road* (Cheney, 2019). Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur internet, memperdalam kerjasama ruang angkasa, mengembangkan standar teknologi, dan meningkatkan efisiensi kebijakan digital di negara mitra BRI. Information silk road ini mulai diperkenalkan di buku putih yang dikeluarkan oleh badan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.

Lebih lanjut gagasan Xi tentang digitalisasi ini diintegrasikan ke dalam proyek BRI. Gagasan ini kemudian dikenal dengan istilah *Digital Silk Road* (DSR). Melalui DSR, China telah memulai pembangunan proyek infrastruktur seperti membangun jaringan kabel yang menghubungkan daratan Asia dan Eropa. China juga menjadi pelopor negara yang membentuk standar internasional (Hao, 2019b). Tujuannya yakni untuk pengembangan teknologi dengan mendorong partisipasi industri demi mengamankan posisi kepemimpinan global. Dengan demikian, saat ini China menjadi negara dalam standarisasi teknologi digital seperti *blockchain*, 5G dan *Internet of Things* (IoT).

Sejak *Digital Silk Road* diperkenalkan China telah menggelontorkan hampir USD 79 triliun untuk proyek yang sedang berjalan (Prasso, 2019). Bahkan China diproyeksikan akan menghabiskan total dana USD 200 triliun untuk mengekspansi strategi digitalnya (Deeks, 2018). Sebagai gambaran, pembangunan jaringan telekomunikasi 5G hanyalah salah satu contoh bagaimana China membangun pusat inovasi digital. Selain itu industri China juga secara aktif mempromosikan pengembangan *BeiDou-2* (Shi-Kupfer & Mareike, 2019). Yaitu sebuah sistem navigasi satelit global sebagai alternatif dari *Global Positioning System* (GPS) yang dimiliki oleh pemerintah AS. Sejumlah negara di Asia termasuk Pakistan, Laos, Brunei, dan Thailand telah mengadopsi *BeiDou*.

Bahkan pada tahun 2016, lembaga Akademi Ilmu Pengetahuan China (*Chinese Academy of Sciences*) mendirikan dua pusat penelitian regional di Hainan dan Xinjiang (Hao, 2019a). Pembangunan lembaga ini menjadi bagian dari prakarsa *Digital Earth Under the Information Silk Road*. Lembaga ini bertugas untuk

mengumpulkan data penginderaan jarak jauh yang berbasis ruang angkasa (*space*) dari berbagai proyek BRI. Lembaga ini berfokus pada pengumpulan data kawasan khususnya di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Inisiatif Digital Earth Under the Information Silk Road ini memungkinkan para negara mitranya untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh iklim. Mulai dari polusi air dan udara, masalah pencemaran sumber daya tanah dan laut, dan kerusakan ekosistem. China kemudian membentuk kerja sama dengan negara mitra BRI untuk menyelesaikan masalah transnasional ini. Dengan adanya Digital Earth under the Information Silk Road di wilayah BRI China berupaya keras untuk memenuhi tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs).

Tantangan lingkungan dan sosial ini akan memerlukan penilaian dan pemantauan ekosistem darat dan laut. Sehingga keputusan dan kebijakan dapat didasarkan pada informasi yang relevan. Oleh karena itu China membutuhkan pengamatan dan pengukuran proses yang tepat, akurat, dan tepat waktu di berbagai skala spasial dan temporal. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan jaringan terintegrasi dengan negara mitra BRI. Sehingga negara pengadopsi dapat mengumpulkan data, seperti sistem pengamatan Bumi in-situ dan lintas ruang dengan mengambil berbagai macam sampel skala spasial dan temporal.

Pada akhir tahun 2017 perusahaan China yaitu Huawei Marine bermitra dengan pemerintah Pakistan untuk membangun *Pakistan East Africa Cable Express*. Yaitu sebuah jalur transportasi kabel yang akan menghubungkan Pakistan ke Kenya dan Djibouti. Huawei Marine juga mengawasi penyelesaian proyek kabel bawah laut di Indonesia dan Filipina. Selain pembangunan di bidang infrastruktur, China juga bekerjasama dengan Alibaba. Kerjasama ini berupaya untuk meningkatkan penggunaan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau *e-commerce*. Pada tahun 2014 hingga 2015 Alibaba telah menginvestasikan sebesar USD 400 juta di *Singapore Post*, sebuah perusahaan jasa pos tradisional di Singapura (Hao, 2019b). Disisi lain perusahaan Tencent, *China Investment Corporation*, dan Didi Chuxing juga bermitra dengan negara Asia

Tenggara yang tergabung dalam BRI untuk berinvestasi di Grab yaitu layanan kendaraan yang berbasis online.

Presiden Xi Jinping telah menekankan pentingnya China menjadi pemimpin dalam teknologi terbarukan. Teknologi ini diantaranya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*, AI), nanoteknologi, komputasi kuantum, pusat data (*big data*) dan kota pintar (*smart city*). Saat ini China telah menghabiskan setidaknya sepuluh kali lebih banyak untuk program penelitian dan pengembangan (*Research and Development*, R&D) kuantum dibandingkan Amerika Serikat; estimasi pembangunan ini mencapai USD 50 miliar. Pada tahun 2018 di sektor kecerdasan buatan, China telah mengajukan 30.000 paten, lebih banyak 2,5 kali lipat dari Amerika Serikat. China juga telah mengumumkan rencana untuk berinvestasi USD 411 miliar dalam meningkatkan sistem telekomunikasi menjadi 5G antara tahun 2020 dan 2030 (Shi-Kupfer & Mareike, 2019). Hal ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya negara yang menandatangani kerjasama dengan China melalui BRI.

Keberhasilan China untuk menjadi negara adidaya teknologi global ini akan memiliki beragam implikasi. Mulai dari segi ekonomi, keamanan, dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik, Afrika, Eropa hingga Amerika. Berbeda dari BRI yang merupakan inisiatif kebijakan luar negeri China, DSR dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya domestik oleh China untuk menegaskan dirinya sendiri sebagai kekuatan teknologi yang dominan di panggung global. Dalam menunjang pelaksanaan DSR, pemerintahan RRC melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar China. Perusahaan ini diantaranya Huawei, ZTE Corporation, Baidu, Alibaba dan Tencent (The Economist, 2020). Hal ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan teknologi 5G dan AI, mempromosikan zona perdagangan bebas digital, mengenalkan *e-governance*, membuat sistem navigasi satelit seperti *Global Positioning System* (GPS) dan menanamkan kabel fiber optik di bawah laut.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena kebanyakan penulis terdahulu hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik di BRI dan

mengesampingkan infrastruktur digital. Sehingga tulisan mengenai DSR tampaknya masih jarang ditemukan. Padahal di era teknologi seperti sekarang ini, sebuah negara harus mulai mempertimbangkan kemampuan teknologi serta keamanan *cyberspace*-nya. Oleh karena itu saat ini China berupaya untuk menjadi negara kekuatan digital baru. China berupaya untuk memanfaatkan potensi industri yang dimiliki, memainkan peran swasta dan mengendalikan pasar di kawasan jalur sutra. Dengan demikian industri digital China dapat memperoleh akses strategis untuk memenuhi sumber daya yang diperlukan agar mampu bersaing di pasar global.

Kajian-kajian sebelumnya memiliki fokus yang dekat dengan DSR dapat disampaikan beberapa. Diantaranya, analisis yang dilakukan oleh Ying Sun pada tahun 2018 menjabarkan mengenai alasan China meluncurkan program DSR. Ying Sun dalam tulisannya yang berjudul *The Reasons Why China's OBOR Initiative Goes Digital* mengatakan bahwa Digital Silk Road terbentuk untuk mengejar pembangunan ekonomi jangka panjang, menekan resistensi politik, membentuk kawasan yang responsif untuk meningkatkan kerjasama China dalam bidang Cyberspace (Sun, 2018). Sedangkan Clayton Cheney peneliti dari Pacific Forum dalam *working papernya* menganalisis bagaimana investasi China dalam infrastruktur digital ini akan membentuk dominasi baru di kawasan Asia-Pasifik dan global (Cheney, 2019). Ia berargumen bahwa China memandang kemajuan teknologi sebagai upaya dalam menentang kekuatan global Amerika Serikat tanpa menciptakan konfrontasi langsung, termasuk kemungkinan konfrontasi militer.

Tidak berbeda jauh dengan Clayton, Dai Mochinaga peneliti dari *Keio Research Institute* mencoba mengeksplorasi pengembangan infrastruktur teknologi China. Dai juga melihat seberapa besar pengaruh dunia maya sebagai bagian dari DSR. Lebih lanjut Dai menganalisis bagaimana respon Jepang terhadap adanya program DSR (Mochinaga, 2020). Dai menyimpulkan bahwa China tidak hanya berusaha untuk memimpin pada pengembangan infrastruktur seperti konstruksi kabel serat optik saja. Akan tetapi China juga melakukan penetapan standar IT dan kerangka hukum terkait teknologi digital ini.

Berbeda dari pemaparan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, penulis akan membahas mengenai upaya implementasi dari DSR yang melibatkan perusahaan teknologi China. DSR merupakan bagian dari strategi ambisius China untuk menghadapi persaingan digital global. Seperti pada umumnya sebuah strategi, China akan mengupayakan kemampuannya dalam mengalokasikan dan memobilisasi segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ekonominya. Saat ini China menjadi pelopor negara yang sadar akan pentingnya teknologi di masa depan. Oleh karena itu melalui proyek DSR ini, China berupaya memaksimalkan *soft power* dan *hard power*-nya melalui pengembangan infrastruktur teknologi dan digital dengan perusahaan teknologi lokal. Semua elemen DSR dipasarkan melalui BRI dengan semua negara mitranya.

Dengan adanya program Digital Silk Road ini China tidak hanya bertujuan untuk menjadi negara adidaya teknologi dan menguasai produksi teknologi digital semata. Lebih luas China berusaha untuk mempromosikan *global connectivity* dan *digital ecosystem*. Keberhasilan China dalam mengimplementasikan *Digital Silk Road* dari BRI ini akan sangat penting dalam melihat kemampuan China untuk meningkatkan pengaruhnya di panggung internasional.

#### 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah ruang lingkup pembahasan berfungsi untuk menunjukkan objek penelitian atau studi tentang peristiwa yang akan dikaji. Dengan adanya ruang lingkup pembahasan, peneliti dapat memfokuskan pada masalah yang akan dijabarkan. Sub bab ini berisi dua batasan yakni batasan materi dan batasan waktu yang dipaparkan sebagai berikut:

#### 1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berfungsi untuk memfokuskan objek yang akan dibahas dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar bahasan tidak meluas ke dalam objek kajian penelitian lain. Dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi beberapa

bagian untuk menganalisis komponen dari DSR. Tujuannya yaitu untuk membuat peta jalan konseptual untuk memahami komponen-komponen dari DSR. Pertama, berfokus pada kondisi ekonomi China di masa Xi Jinping. Kedua, kebijakan China melakukan investasi dan pengembangan teknologi dalam bentuk digital infrastruktur termasuk jaringan seluler 5G, penanaman kabel serat optik, kecerdasan buatan, kota pintar dan pusat data. Ketiga, upaya China dan perusahaan teknologi nasionalnya dalam mempromosikan konektivitas global dan ekosistem digital untuk menjadi negara adidaya teknologi melalui DSR.

#### 1.2.2 Batasan Waktu

Peneliti menggunakan batasan waktu untuk memberikan tenggat waktu kapan peristiwa atau kajian itu dikaji. Batasan waktu dalam penelitian ini berlangsung pada tahun 2015 hingga pada tahun 2019. Pada bulan Maret 2015, badan Komisi Reformasi dan Pembangunan China, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan China bersama-sama menerbitkan *blueprint* pertama tentang DSR. Di dalam dokumen tersebut juga termuat rencana pembangunan *an information silk road* atau jalur informasi sutra (National Development and Reform Commission People's Republic of China, 2015). Dokumen ini berisi tentang pembangunan jaringan kabel bilateral, perencanaan pembangunan proyek kabel bawah laut lintas antar benua, dan meningkatkan rute satelit. Hingga tahun 2019 program DSR telah menghabiskan dana sebesar USD 79 miliar untuk 53 program yang telah berjalan di seluruh dunia (Chase, 2019) yang kemudian berdampak pada pertumbuhan industri teknologi nasional, memberikan pengaruh terhadap persaingan teknologi secara global serta meningkatkan dominasi China di tatanan internasional.

#### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah akar dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan ide dari penelitian muncul ketika terdapat fenomena yang tidak berjalan sesuai

dengan kondisi ideal atau terdapat masalah yang perlu dianalisis agar menjadi kajian yang dapat mengevaluasi proses berlangsungnya suatu hal. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menyatakan rumusan masalah yang akan menjadi riset untuk diteliti yakni:

# Bagaimana upaya China dalam mengimplementasikan program Jalur Sutra Digital (Digital Silk Road)?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan mekanisme *Digital Silk Road* serta dampak dari implementasi program *Digital Silk Road* di kawasan Asia pasifik dan global.

#### 1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian adalah hal yang perlu disertakan agar penulisan menjadi sistematis. Kerangka konseptual ini memuat teori yang menjadi landasan dalam menulis dan konsep yang akan memperdalam analisis mengenai isu yang diangkat. Oleh karena itu untuk membantu menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Ekonomi Politik Internasional dan Konsep Structural Power.

Peneliti menggunakan teori EPI sebagai naungan kerangka konseptual dari konsep structural power. Konsep *structural power* ini merupakan kritik dari adanya politik komparatif internasional. Peneliti komparatif pada masa lalu menekankan bahwa negara memiliki ketergantungan yang kuat dengan para pemegang modal, akan tetapi argumen ini tidak dapat menjelaskan mengapa para pebisnis mengalami kekalahan pada persaingan politik. Para pengamat hubungan internasional memberikan perhatian lebih kepada negara-negara dengan kekuatan besar sendiri (Culpepper, 2015). Akan tetapi para pengamat ini mengabaikan pola kapitalisme

global yang menjadikan perusahaan besar untuk menjadi pemain politik dengan caranya.

Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa dalam menghubungkan antara ekonomi politik internasional dan studi komparatif, konsep structural power dianggap paling tepat. Konsep *structural power* dapat menggambarkan bagaimana hubungan timbal balik antara negara dan bisnis. Dalam penelitian ini penulis akan memperlihatkan peran agen baik itu negara maupun perusahaan sebagai suatu entitas aktor politik untuk menciptakan dominasi internasional yang baru.

#### 1.5.1 Ekonomi Politik Internasional

Selama satu dekade terakhir, studi mengenai ilmu hubungan internasional mengalami pergeseran. Dari isu yang dikenal sebagai high politics seperti militer dan intervensi menjadi isu *low politics* seperti masalah lingkungan, diplomasi, ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hubungan internasional, adanya globalisasi dan perubahan-perubahan ini akan berkonsekuensi pada pergeseran paradigma lama. Dari isu yang *high politics* menuju paradigma baru yang lebih relevan terhadap dinamika masyarakat global. Globalisasi menjadikan masyarakat untuk terintegrasi satu sama lain. Dengan kata lain bisa dikatakan hampir tidak ada sekat antara satu entitas dengan entitas lain (Ani, 2018). Dengan demikian peran aktor non-negara semakin dominan daripada negara sehingga menjadikan ilmu hubungan internasional semakin luas dan berwarna.

Studi mengenai ekonomi politik internasional (EPI) dapat ditelusuri kembali pada tahun 1971 ketika Susan Strange membangun studi ilmu EPI di London School of Economics and Politics. Lebih lanjut kelompok peneliti EPI kemudian terbentuk di Royal Institute of International Affairs at Chatham House. Pada awalnya, kelompok studi EPI ini terdiri dari para sarjana, jurnalis dan pembuat kebijakan yang berfokus pada isu-isu seperti bagaimana memperbaiki fixed rated system atau sistem nilai tukar. Definisi ekonomi politik internasional ekonomi menurut Susan Strange menyangkut ranah sosial, politik, dan pengaturan ekonomi yang mempengaruhi sistem produksi global (Strange, 1984). Strange menekankan

bahwa EPI tidak hanya studi mengenai lembaga atau organisasi, tetapi juga nilainilai, budaya dan sejarah yang mereka cerminkan.

Studi terkait EPI mencoba untuk mengelaborasi bagaimana suatu keputusan politik akan mempengaruhi bidang ekonomi. EPI dapat dikatakan sebagai alat teknis dalam melakukan pendekatan konseptual ekonomi modern yang menganalisis mengenai pentingnya politik bagi ekonomi. Politik sendiri didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan dan wewenang (Hammood, 2011). Kekuasaan dan wewenang ini hanya relevan ketika ada heterogenitas kepentingan, yaitu konflik kepentingan antar aktor ekonomi dalam suatu masyarakat. EPI merupakan bidang interdisipliner yang terdiri dari pendekatan perdagangan, keuangan internasional, dan kebijakan negara yang mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Singkatnya EPI berkaitan dengan bagaimana kekuatan politik (negara, lembaga, aktor individu) mempengaruhi interaksi ekonomi dan sebaliknya efek interaksi ekonomi menjadi dasar dalam menentukan kebijakan politik.

Mengutip dari Mochtar Mas'oed, ekonomi politik adalah studi yang mengaitkan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi (Masoed, 1994). Lebih lanjut Mochtar Mas'oed hubungan antara negara dengan pasar, keterkaitan lingkungan domestik dan lingkungan internasional, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sementara itu Sarah Collinson konsultan independen dari *HPG Research Fellow*, berpendapat bahwa analisis mengenai EPI berkaitan dengan proses interaksi politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat (Collinson, 2003). Interaksi ini dimulai dari distribusi kekuasaan dan kekayaan antara berbagai kelompok dan individu. Hal ini juga berkaitan erat dengan proses menciptakan, mempertahankan, dan mengubah interaksi politik dan ekonomi dari waktu ke waktu.

Joyce P. Kaufman seorang Profesor ilmu politik di Whittier College berpendapat bahwa untuk memahami isu pada abad ke 21 ini, kita harus mengetahui perubahan apa yang terjadi (Kaufman, 2013). Kemudian mengkontekstualisasikan dengan teori-teori tradisional, menyoroti kekuatan dan kelemahannya serta

menganalisis dampaknya terhadap dunia global melalui perspektif politik internasional.

Dalam melihat globalisasi ini penulis berargumen bahwa Ekonomi Politik Internasional (EPI) menjadi alat yang sesuai untuk melihat keterkaitan antara aktor politik (negara, institusi/lembaga, kebijakan dan individu) yang mempengaruhi interaksi ekonomi dan sebaliknya dimana ekonomi internasional akan berdampak pada proses politisasi.

Prinsip pertama dari EPI adalah negara, dalam konteks ini negara dianggap sebagai negara yang berdaulat, sehingga negara memiliki kekuatan absolut. Kekuatan ini dapat memaksa dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan warganya. Negara menjadi satu-satunya institusi yang memiliki otoritas meliputi semua aspek mulai dari politik, ekonomi bahkan militer baik didalam negara itu sendiri maupun saat terjadi konflik dengan negara lain. Dengan demikian negara memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan bagi negara itu sendiri. Prinsip selanjutnya yakni pasar, didalamnya terdapat perusahaan nasional/multinasional, kelompok pebisnis, koperasi bahkan individu. Dengan melihat prinsip kedua ini, sebuah negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi kesejahteraan individu maupun khalayak umum.

#### 1.5.2 Structural Power

Selain menggunakan Teori Ekonomi Politik Internasional, penulis akan menggunakan konsep *Structural Power* atau kekuatan struktural yang dikemukakan oleh Susan Strange. Susan Strange merupakan seorang ilmuwan hubungan internasional yang berasal dari Britania Raya. Dalam buku States and Market, Susan mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis kekuasaan (*power*) yang digunakan dalam memahami ekonomi politik internasional, yaitu *Relational Power* dan *Structural Power*. Namun disini penulis akan mengelaborasi lebih dalam tentang *Structural Power*.

Structural power is the power to shape and determine the structure of global political economy within other states, their political institutions, their economic

enterprises and (not least) their scientists and other professional people have to operate". "Rather more than the power to shape the agenda of discussion or to design the international regimes of roles and customs that are supposed to govern international economic relations. That is one aspect of structural power, but not all of it [...] Structural power, in short, confers the power to decide how things shall be done, the power to shape frameworks within which states relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprises. (Strange, 1988, p. 24)

Kekuasaan struktural adalah sebuah kekuatan untuk membentuk dan menentukan struktur atau dalam ekonomi politik global. Kekuasaan ini meliputi lembaga-lembaga politik, usaha ekonomi serta orang ahli yang dapat menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Singkatnya, kekuatan struktural merujuk pada bagaimana suatu hal harus diputuskan. Kekuasaan struktural ini akan membentuk suatu pola kerangka kerjasama yang saling berhubungan baik itu dengan individu, perusahaan maupun entitas lain yang terkait. Definisi tersebut mempertegas tentang bagaimana konsep kekuatan struktural dalam melihat kapasitas lembaga formal, legitimasi, pengetahuan dan bentuk-bentuk produksi di dalam politik hubungan internasional.

Menurut Susan Strange di dalam *structural power* terdapat empat aspek yang saling berkaitan yakni *security structure*, *production structure*, *finance structure* dan terakhir *knowledge structure*. Dalam buku *States and Market* Strange menggambarkan bahwa *structural power* berbentuk tetrahedron (Strange, 1988, p. 27). Dimana keempat aspek tersebut saling berkaitan, dan tidak ada dominasi diantara aspek tersebut. Masing-masing aktor ini memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda dalam mencapai tujuannya.

#### 1. Security structure

Security structure menurut Susan Strange adalah "the framework of power created by the provision of security by some human being others" (Strange, 1988, p. 45.) Sehingga struktur keamanan dapat diartikan sebagai kerangka kekuasaan yang diciptakan oleh penyediaan keamanan dan diperuntukkan bagi manusia yang lain.

Dalam hal ini struktur keamanan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar individu (dalam hal ini negara) yang harus dipenuhi sebagai modal utama dalam

konteks hubungan internasional. Sehingga individu maupun kelompok dari negara ini harus merasa aman dalam melakukan interaksi dengan dunia internasional untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan ketertiban dunia. Dengan demikian, security structure adalah adalah suatu proses siapa mendapatkan apa (who gets what) dalam kegiatan ekonomi.

Di abad 21 internet memang bukan elemen utama dalam struktur keamanan. Namun di era ini internet berfungsi menjadi penopang struktur keamanan modern, sehingga struktur keamanan modern tidak bisa dilepaskan dari keberadaan internet. Dengan adanya revolusi industri 4.0 semua perangkat akan terhubung melalui internet yang kemudian terbentuklah suatu teknologi baru yaitu, Internet of Things. Dengan adanya koneksi seperti Internet of Things, komputasi awan (cloud computing) dan data besar (big data), maka peran keamanan siber (cybersecurity) menjadi sangat penting untuk melindungi data yang digunakan. Cybersecurity merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk melindungi informasi, komunikasi, dan teknologi dari bahaya yang terjadi, baik sengaja maupun tidak demi mencegah cyber crime atau kejahatan siber. Dengan demikian cybersecurity dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, serta proses yang terkontrol baik secara administratif, fisik, maupun teknis.

Hingga saat ini, upaya China untuk mempromosikan *cybersecurity* sebagai bagian dari BRI masih menjadi topik yang relatif jarang untuk dibahas. Namun, peneliti melihat bahwa investasi *cybersecurity* yang dilakukan China merupakan landasan pengembangan infrastruktur di Eurasia. Hal ini ditunjukkan pada pidato Presiden Xi Jinping di tahun 2018 dimana China mengidentifikasi pengembangan *cybersecurity* sebagai komponen kunci dari *Digital Silk Road*. Pemerintah China juga menilai bahwa *cybersecurity* akan memainkan peran yang semakin penting dalam proyek pengembangan BRI, terutama karena infrastruktur jaringan canggih seperti kota pintar *(smart city)* (Shi-Kupfer & Ohlberg, 2019). Untuk memenuhi standar keamanan ini, China telah berupaya mendorong perusahaan keamanan siber

yang berbasis di China untuk melakukan strategi "go out" dan berinvestasi di negara-negara mitra BRI.

Strategi *going out* ini dituangkan dalam China pedoman yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Pusat Informasi Negara China (China State Information Centre, SIC). Pedoman ini berjudul "Pemanfaatan 'Sabuk dan Jalan' untuk Mempercepat Pertumbuhan Perusahaan Keamanan Siber di China" atau "Leveraging the 'Belt and Road' to Accelerate the Growth of Cybersecurity Enterprises in China." Dokumen tersebut memperlihatkan bahwa BRI menghadirkan peluang signifikan bagi perusahaan cybersecurity yang berbasis di China untuk memperluas pasar mereka di luar negeri (Green, 2019). Sebagai timbal baliknya SIC mengusulkan membangun mekanisme hubungan antara pemerintah China dan perusahaan keamanan siber terpilih. Hal ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan ini dapat bekerja sama mendukung tujuan strategis nasional China, memahami kebutuhan negara-negara mitra, dan membangun arsitektur dukungan interaktif antara perusahaan negara dan keamanan.

#### 2. Production structure

Menurut Susan Strange production structure merupakan "the sum of the arrangement determining what is produce, by whom and for whom, by what method and on what term" (Strange, 1988, p. 64). Dengan demikian struktur produksi melihat bahwa pemangku kebijakan akan berperan penting dalam proses produksi dan distribusi. Mereka akan menentukan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa produk dibuat dan bagaimana cara pendistribusian produk tersebut. Di era globalisasi ini struktur produksi erat kaitannya dengan internasionalisasi produk dengan tujuan untuk perluasan pasar sehingga meningkatkan tumbuhnya perusahaan multinasional (Multi National Company, MNC).

Dalam program DSR, elemen production structure merujuk pada perusahaan yang terlibat dalam DSR yaitu Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei dan ZTE. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan produk berupa *Cloud Computing*,

Artificial Intelligence (AI), kabel serat optik, jaringan komunikasi 5G dan satelit, platform *e-commerce* dan *e-governance* serta *smart cities*.

#### 3. Finance structure

Di dalam struktur keuangan terdapat dua aspek yang saling terikat yaitu lembaga keuangan dan struktur keuangan. Lembaga keuangan ini berfungsi sebagai pengatur bagaimana sebuah bisnis mendapatkan aliran dana untuk proses produksi barang/jasa dan pendistribusiannya dan siapa saja yang dapat mengakses dana tersebut (berkaitan antara pemerintah dengan bank). Struktur keuangan ini menyangkut sistem keuangan yang menentukan nilai tukar dari mata uang yang beragam dan berkaitan erat antara pemerintah dengan pasar.

The power to create credit implies the power to allow or to deny other people the possibility of spending today and paying back tomorrow. The power let them exercise purchasing power and thue influence markets for production, and also the power to manage or mismanage the currency in which credit is denominated, this affecting the rates of exchange with credit denominated in other currencies. (Strange, 1988, p. 90)

Di tingkat internasional, kepercayaan diri sebagai kreditor merujuk kepada kemampuan pengelolaan mata uang yang mendominasi. Hal ini mempengaruhi nilai tukar kredit dengan mata uang lain. Dengan demikian, Susan Strange mengindikasikan bahwa sistem moneter merupakan komponen kunci dalam struktur keuangan, bersama dengan hubungan sosial antara kreditur dan debitur.

Dalam program DSR, faktor struktur finansial ini berupa upaya pemerintah China untuk memfasilitasi proyek DSR. China berupaya untuk mengerahkan bankbank sebagai penyalur modal, pengelola investasi di luar negeri serta berfungsi sebagai akusator perusahaan asing. Bank ini diantaranya *Export Import Bank* (Exim), *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB), *Silk Road Fund* (SRF) dan *New Development Bank* (NDB). Selaras dengan banyaknya lembaga keuangan China yang berpartisipasi dalam DSR maka China juga berupaya untuk menginternasionalisasi mata uang Renminbi dalam praktek pengimplementasian DSR.

#### 4. Knowledge structure

Stuktur pengetahuan menurut Susan Strange adalah "structure which determines what knowledge is discovered, how it is stored, and who communicates it by what means to whom and on what terms" (Strange, 1988, p. 121). Dengan kata lain struktur pengetahuan yang berfungsi sebagai penyedia akses kepada masyarakat luas untuk mengetahui temuan teknologi terbarukan. Pengetahuan maupun studi terkini mengenai isu sosial maupun sains agar dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat.

Definisi struktur pengetahuan meliputi elemen ideologis dan elemen yang berkaitan dengan teknologi serta ilmu pengetahuan. Menurut Susan Strange struktur pengetahuan berasimilasi dengan jumlah pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu negara. Konsekuensinya, penguasaan sistem teknologi yang canggih dapat mempengaruhi kekuatan struktural suatu bangsa.

Struktur *knowledge* menjawab tujuan dari diluncurkanya proyek DSR yakni China berupaya untuk membangun infrastruktur yang mendukung globalisasi yang inklusif. lebih lanjut China berupaya untuk membuka lapangan kerja baru bagi negara mitranya. Sehingga kesepakatan kemitraan di antara negara-negara dalam kerangka kerja BRI dapat tercapai. China juga akan menciptakan lingkungan yang digital dengan membuat *collective data* (komputasi awan dan AI) untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lebih lanjut China akan memanfaatkan teknologi satelit untuk memantau cuaca, praktik penggunaan lahan dan penerapan smart cities untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan seperti kekeringan dan banjir. Singkatnya, DSR berupaya menawarkan peluang untuk menjadikan jalur BRI untuk menjadi koridor kerjasama digital yang efisien dan berkelanjutan melalui teknologi tingkat tinggi.

Secara keseluruhan keempat aspek dari structural power yang telah diuraikan di atas tidak bisa dimengerti dengan cara memisahkan satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya semua aspek tersebut memiliki pertanyaan yang sama, yaitu:

Who gets the benefits and who would pay? Who gets new opportunities to acquire wealth or power, security, or freedom to choose? Who has imposed on them new risks of being denied these things? What effects do market mechanisms have on authority and what is the impact of authorities on markets and the operators in them?. (Strange, 1988 p.121)

Susan Strange juga memperkuat argumennya bahwa "Structure power was a capacity mainly inherent in a few large state" (Strange, 1996). Dimana kekuatan struktur (ekonomi) akan menjadi salah satu kapasitas kuat yang dimiliki negara, dengan kata lain suatu negara yang memiliki kekuatan besar dapat mempengaruhi negara lain.

#### 1.6 Argumen utama

Inisiasi Digital Silk Road (DSR) dalam Belt and Road Initiative (BRI) yang dicanangkan China sejak tahun 2015 ini memiliki konteks ekonomi politik internasional. Hal ini dapat tercermin dari tingkatan sumber daya yang dimiliki China baik dari segi security, finance, production hingga knowledge. Dari sinilah kemudian pemerintah China dan perusahaan domestik China saling berinteraksi untuk memberikan pengaruhnya satu sama lain, khususnya dalam hal pengimplementasianya. Ketika semua aktor ini berhasil berkolaborasi dalam hal implementasi maupun operasionalnya, maka dapat dikatakan bahwa China telah memegang kendali structural power. Dengan segala aspek yang telah dimiliki ini, China akan menciptakan ketergantungan dan pengaruh. Dengan kata lain China akan menciptakan kekuatan untuk menarik negara-negara yang telah bergabung dalam BRI untuk turut menggunakan produk digital dari perusahaan teknologi China. Digital Silk Road akan menjadi komponen dari Inisiatif BRI yang bertujuan menjadikan China sebagai negara adidaya teknologi global dengan menggandeng perusahaan teknologi China yang sudah berkompeten dan terdepan. Dengan demikian Digital Silk Road ini akan mempertegas tujuan nasional China untuk menjadi negara adidaya teknologi dan memperkuat pengaruh politik serta mengamankan posisi China di dunia internasional. Lebih lanjut dengan adanya Digital Silk Road perusahaan teknologi China akan mendapatkan pasar yang lebih

luas, berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional serta memajukan ekonomi China.

#### 1.7 Metode Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, metode penelitian digunakan untuk memperoleh kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan. Metode penelitian meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data berguna untuk mengumpulkan data-data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Sedangkan metode analisis data digunakan untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan sebelumnya untuk menjawab permasalahan dalam sebuah karya tulis ilmiah.

#### 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari analisis pihak lain baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang terkumpul dalam bentuk sebuah jurnal, berita maupun buku. Dan metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai literasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dianalisis. Literasi tersebut berupa buku (cetak ataupun *e-book*), artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

#### 1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menjelaskan dan memahami masalah sosial dengan membuat gambaran secara menyeluruh dari data dan sumber informasi yang diperoleh. Dengan menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif maka diharapkan bahwa penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam sehingga dapat menjelaskan fenomena yang terjadi serta menjawab permasalahan karya tulis ilmiah ini.

#### 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang secara umum upaya pemerintah China dalam pengimplementasian *Digital Silk Road* yang bekerjasama dengan perusahan teknologi China. Pada bab ini juga akan dielaborasi lebih detail mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian. Penulis juga akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual yang digunakan untuk mendukung analisis upaya implementasi Digital Silk Road oleh pemerintah China dengan menggunakan Teori Ekonomi Politik Internasional dan Konsep *Structural Power*.

#### BAB 2. KEBANGKITAN EKONOMI CHINA DI ERA XI JINPING

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang profil negara China secara umum. Lebih lanjut penulis akan memaparkan pertumbuhan ekonomi China dan membahas strategi kebangkitan China, upaya ekspansi ekonomi China untuk menjadi negara great power dalam bidang ekonomi dalam proyek Belt and Road Initiative.

#### BAB 3. POTENSI TEKNOLOGI DAN PROGRAM DIGITAL SILK ROAD

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai proses perkembangan teknologi di China dan penjelasan mengenai program *China's Digital Silk Road*. Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan perusahaan teknologi dan komunikasi yang terlibat di dalam upaya ekspansi teknologi China seperti Baidu, Alibaba, Tencent, ZTE dan Huawei.

#### BAB 4. IMPLEMENTASI CHINA'S DIGITAL SILK ROAD

Bab ini pada dasarnya akan menjawab rumusan masalah dari penelitian. Penulis akan membuktikan upaya apa saja yang dilakukan China dalam pengimplementasian DSR untuk menjadikan China sebagai negara adidaya teknologi dengan menganalisis teori Ekonomi Politik Internasional dan konsep *Structural Power*. Di bab ini akan diuraikan lebih detail mengenai produk apa saja yang dihasilkan melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi dan komunikasi seperti Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei dan ZTE. Penulis juga akan menyertakan dengan contoh negara-negara pengadopsi teknologi buatan China ini.

#### BAB 5. KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini peneliti akan menyimpulkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini berisi penjabaran singkat dan menyeluruh dari penelitian yang sudah dilakukan dan ditulis dari BAB 1 hingga BAB 4.

#### **BAB 2 KEBANGKITAN EKONOMI CHINA**

Pada bab ini penulis akan membahas perekonomian China yang menjadi salah satu *soft power* China untuk melakukan berbagai macam strategi ekspansi ekonomi. Strategi kebangkitan ekonomi dan kerjasama ekonomi dengan banyak negara dijadikan China sebagai bentuk dari *soft* diplomasinya di kancah internasional. Perekonomian China yang maju dan berhasil akan memberikan dampak yang positif bagi China serta memperkuat posisi tawar-menawar (*bargaining position*) negaranya. Dengan mencapai posisi yang diinginkan China, pada akhirnya China akan mendapatkan target yang diincar menjadi negara *great power*.

#### 2.1 Kondisi Ekonomi China Sebelum dan Sesudah Era Reformasi Ekonomi

Selama berabad-abad China dikenal sebagai pusat peradaban dunia dan dipimpin oleh dinasti yang terkemuka. Setelah melalui serangkaian pergolakan sipil dan peristiwa revolusioner, pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Mao Zedong dan Partai Komunis, China menjadi sebuah negara republik yang berideologi komunis. Meskipun China telah beralih ke pola pemerintahan yang baru, namun China masih terisolasi dari ranah politik internasional. Oleh karena itu Mao Zedong di berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa China bersedia membuka diri dan berinteraksi dengan dunia internasional. Selaras dengan pernyataan Mao, China kemudian merumuskan landasan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan prinsip China sebagai negara yang berdaulat dalam hubungan internasional 1954 (Zhou Enlai Peace Institute, 1953). Prinsip ini disebut *The Five Principles of Peaceful Coexistence* atau Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.

The Five Principles of Peaceful Co-existence ditulis oleh Perdana Menteri Zhou Enlai pada tahun 1953 dan diterbitkan pertama kali di kesepakatan kerja sama antara China dan India di wilayah Tibet pada. Lima Prinsip Koeksistensi Damai ini

kemudian menjadi dasar negara China untuk merumuskan kebijakan luar negerinya yang bertujuan untuk menjalin perdamaian serta meningkatkan keamanan internasional. Kelima prinsip ini meliputi: mutual respect for sovereignty and territorial integrity (saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial), equality and mutual benefit (menjaga kesetaraan dan saling menguntungkan) mutual non-aggression (tidak saling menyerang), non-interference in each other's internal affairs (tidak campur tangan dalam urusan domestik negara) dan peaceful coexistence (menjaga kedamaian dalam hidup).

The Five Principles of Peaceful Co-existence ini mencerminkan penolakan tradisi imperialisme dan kolonialisme terhadap negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu, China berupaya mengajak semua pihak untuk menciptakan tatanan hidup yang setara bagi semua negara. Hingga saat ini, China percaya bahwa *lima prinsip hidup berdampingan secara damai* masih cukup relevan dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan luar negerinya.

Pasca perang dingin usai hampir semua negara mengalami banyak perubahan, tidak terkecuali China. Di kawasan Asia, China mulai menunjukkan eksistensinya dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pengaruh politik yang dominan serta kekuatan militer yang semakin kuat. Secara geografis, China merupakan negara ketiga terbesar di dunia dengan luas wilayah 9,6 juta km². Saat ini China menempati sebagai negara terpadat di dunia dengan jumlah populasi mencapai 1,4 miliar jiwa (Worldometer, 2020).

Sejalan dengan kondisi geografis dan penduduk yang dimiliki China, hal ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat produktivitas barang dan jasa. Hal ini kemudian berdampak pada ekspansi perdagangan yang luas. Faktor inilah yang menyebabkan produk China banyak tersebar dan diminati di penjuru dunia karena harganya lebih terjangkau dan memiliki berbagai varian. Menurut (Cipto, 2018) saat ini China telah menjadi pusat industri manufaktur, penyedia layanan jasa serta pusat pengembangan riset dan teknologi dunia. Implikasi dari pesatnya pertumbuhan ekonomi ini menjadikan China tidak lagi dipandang sebelah mata, bahkan China dapat dikatakan sebagai negara adidaya baru di dunia.

Pada masa kepemimpinan Mao Zedong, China terkenal dengan negara yang menutup diri dari dunia internasional (Darini, 2010). Hal ini dapat terlihat dari sikap China yang masih mengisolasi perekonomian negaranya. Alasan ini muncul karena China ingin menjaga kepentingan nasional dan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu Mao menjalankan prinsip ekonomi terpusat yang diatur oleh negara atau pimpinan. Dengan demikian negaralah yang mengatur barang produksi, tujuan produksi, mengendalikan harga di pasar serta mengatur lokasi sumber dayanya.

Mao merupakan seorang pemimpin yang menganut keras pemikiran Sosialisme seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin dll. Pemikiran marxis Mao inilah yang kemudian disebut Maoisme. Hal ini disebabkan karena Mao menerapkan prinsip-prinsip marxis dalam pembentukan ekonomi China semenjak saat menjadi petinggi Partai Komunis China (PKC atau *Chinese Communist Party*, CCP). Ketika Mao memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat China (RRC) kondisi ekonomi negara saat itu sedang terpuruk karena terjadi perang dagang antara China dengan Jepang (Darini, 2010). Mao kemudian membuat kebijakan untuk memulihkan pabrik, meningkatkan produksi, membangun infrastruktur dan transportasi serta mereduksi pengeluaran pemerintah. Selain itu Mao melakukan kebijakan ekonomi yang memusatkan pertanian/agraria sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga pada saat itu China mampu memenuhi kebutuhan dasar negaranya tanpa bantuan negara asing dengan mengandalkan sektor pertanian dan industri.

Reformasi ekonomi mulai dilakukan China pada pemerintahan Deng Xiaoping pada tahun 1979. Kebijakan Deng Xiaoping adalah dengan membuka pasar bebas untuk memperluas ekspor impor dan menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di China (Stanzel, Rolland, Jacob, & Hart For European, 2017). Saat itu Deng Xiaoping juga mulai terbuka terhadap politik ekonomi internasional namun tetap memegang prinsip untuk memajukan pembangunan ekonomi negara dan meminimalisir kerugian bagi China. Deng Xiaoping menetapkan bahwa China harus mampu "melangkah dengan kaki sendiri" atau

dalam bahasa mandarin disebut *zou ziji de lu*, prinsip ini kemudian dielaborasi menjadi sebuah konsep *zhongguo te se de shihui zhuyi* atau "Sosialisme ala China."

Bermula dari gagasan inilah China kemudian mulai terbuka dengan dunia internasional. Hal ini terlihat dari keikutsertaan China di berbagai institusi maupun organisasi dan pertemuan bilateral maupun multilateral dalam kawasan regional maupun internasional. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap dengan menerima mata uang asing, melakukan perdagangan internasional (Widyahartono, 2004). Implikasi dari keterbukaan ini adalah pada tahun 1980 China akhirnya membuat area ekonomi khusus di wilayah Guangdong (Shenzhen, Zhuhai, Shantou) serta di Pulau Xiamen tepatnya di daerah Fujian. Hal ini terlihat dari masifnya aliran dana dari investasi asing untuk pembangunan sumber tenaga listrik, pelabuhan dan jalan raya (Muas, 2008). Dengan adanya reformasi ekonomi Deng Xiaoping ini, kebijakan pembangunan ekonomi pun akan mengurangi peran pemerintah pusat dan akan mengikuti mekanisme pasar.

Melanjutkan reformasi Deng Xiaoping, di era Jiang Zemin pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 10% (Cipto, 2018). Kemajuan ekonomi China di era Jiang Zemin ini dikenal dengan istilah *state-led capitalism* atau sistem kapitalisme yang dikomandoi oleh sebuah negara. Dengan demikian negara akan lebih terbuka dengan kerja sama internasional dan investor asing (Setzekorn, 2009). Dampaknya adalah negara akan berfokus pada pengendalian sektor ekonomi yang strategis guna menopang pertumbuhan industri di China yang semakin pesat pada saat itu.

Pada tahun 2003 Hu Jintao menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di China. Dalam kepemimpinan Hu Jintao terlihat lebih agresif dalam memperjuangkan kebijakan keterbukaan atau *open door policy* (Taniputera, 2011). Pertumbuhan PDB China meningkat signifikan semenjak bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada 2001. Dalam kurun waktu satu dekade sejak kepemimpinan Hu Jintao PDB China mencapai lima kali lipat (World Bank, 2020a).

Pertumbuhan industri China di abad 21 ini tidak dapat terelakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi minyak dan batu bara. Tercatat peningkatan ini mencapai 3 kali lipat untuk produksi industri domestiknya. Dengan kondisi demikian Hu Jintao pun mulai berekspansi ke Asia Selatan, Amerika Latin hingga ke Afrika (Zhao, 2019). Tujuannya yaitu untuk mendapatkan cadangan energi baru demi menjaga kestabilan produksinya. Selain batu bara dan minyak China juga mulai mendiversifikasi sumber energi seperti gas alam, tenaga surya hingga tenaga air untuk menggerakkan roda industrinya. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Hu Jintao, China terkenal dengan Diplomasi Energi.

Selama pemerintahan, Hu Jintao menggunakan strategi yang ekspansif dan hegemonik. Hu Jintao berupaya untuk menguasai ekonomi internasional dengan berlandaskan asas *The Peaceful Rise of China* atau umum dikenal dengan prinsip kebangkitan China yang damai. Dokumen ini termuat dalam *China Peaceful Development Road* (heping fazhan dalam bahasa Mandarin) yang disahkan pada 22 Desember 2005. Dalam dokumen tersebut, Amerika Serikat (AS) mempersepsikan China memiliki lima skema untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran ekonomi (AIIB, 2006). Strategi ini meliputi upaya modernisasi China, mempromosikan perdamaian dan pembangunan dunia; membuat inovasi dan reformasi kerjasama dengan negara mitra agar saling menguntungkan; mengupayakan pengembangan negara dengan bertumpu pada kekayaan sumber daya yang dimiliki; serta mewujudkan kesejahteraan bersama dengan menciptakan dunia yang damai dan harmonis.

Puncak kebangkitan China semakin terlihat di masa kepemimpinan Xi Jinping. Berselang dua hari sejak didapuk menjadi presiden China, Xi mendeklarasikan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga dalam mewujudkan *Chinese Dream*<sup>1</sup> (Kuhn, 2013). Mengutip dari pidato Xi, China akan menjadi

<sup>1</sup> Sebuah gagasan kolektif yang meyakini bahwa China akan menjadi negara kuat yang maju diberbagai bidang kehidupan di masa depan. Konsep *Chinese Dream* atau mimpi China memiliki dua tujuan utama yaitu: China bertekad untuk menjadi negara adidaya pada tahun 2020, serta memastikan bahwa China akan menjadi pemimpin ekonomi di dunia.

negara yang moderat di ulang tahun ke-100 Partai Komunis China (PKC) dan akan menjadi negara maju yang sesungguhnya pada tahun 2049 tepat di 100 tahun berdirinya Republik Rakyat China (RRC). *The Chinese Dream* memiliki 4 aspek diantaranya *Strong China* (ekonomi, politik, diplomatik, ilmiah dan militer); *Civilized China* (keadilan, budaya yang beragam serta adab yang tinggi); *Harmonious China* (persahabatan di antara kelas sosial); Beautiful China (mencakup lingkungan yang sehat dan polusi rendah):

The Chinese Dream," he said, is "the great rejuvenation of the Chinese nation. Two 100s": the material goal of China becoming a "moderately well-off society" by about 2020, the 100th anniversary of the Chinese Communist Party, and the modernization goal of China becoming a fully developed nation by about 2049, the 100th anniversary of the People's Republic. (Kuhn, 2013)

Di pemerintahan Xi, China menunjukan pengaruhnya secara global, bahkan dapat dikatakan menyaingi negara maju seperti Amerika, Inggris, Belanda dsb. Pasca krisis keuangan yang memporak-porandakan negara Barat, pertumbuhan perekonomian China justru semakin menguat. Sejak tahun 2013 China juga memanfaatkan batubara dan mengekspansi hasil produksinya ke seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya melalui kerja sama ekonomi bilateral maupun regional.

#### 2.2 Kebangkitan Ekonomi China di Era Xi Jinping

Pada awal masa pemerintahanya Xi melakukan beberapa langkah untuk mengambil kebijakan dalam lingkup politik domestiknya. Beberapa diantaranya yakni mengendalikan suku bunga bank, mengurangi korupsi, dan memperkuat kendali terhadap media dan opini publik. Sedangkan untuk kebijakan luar negerinya, China konsisten dengan prinsip *The Five Principles of Peaceful Coexistence* namun dilakukan dengan sedikit penyesuaian. Kongres PKC ke-18 menyatakan bahwa China akan melanjutkan kebijakan luar negerinya yang independen (Lampton, 2013). China akan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan konflik internasional. China juga berupaya menjalin hubungan dengan dunia internasional dengan tidak membentuk aliansi tertentu. Kebijakan

luar negeri China sebelum era XI Jinping cenderung mendeklarasikan tentang keharmonisan dan kekeluargaan. Namun saat ini pemerintahan Xi Jinping lebih memilih untuk menggunakan konsep *Chinese Dream*.

Di tahun 2013 Xi Jinping menjabat sebagai pemimpin Republik Rakyat China (RRC). Xi memiliki prinsip yang dituangkan ke dalam buku putih dan dijadikan dasar dalam menjalankan pemerintahan (Lampton, 2013). Prinsip ini diantaranya: (1) Pengertian timbal balik dan disertai dengan kepercayaan strategis, (2) Menghormati kepentingan utama masing-masing pihak, (3) Kerja sama yang menguntungkan bagi semua pihak, (4) Memperluas kerjasama dan koordinasi masalah-masalah internasional dalam menanggapi berbagai isu-isu global yang berkembang di tatanan dunia.

Pada dasarnya sejak kepemimpinan sebelum Xi Jinping, China telah mengupayakan agar negaranya semakin kuat. Namun di masa pemerintahan Xi Jinping saat ini China terlihat lebih agresif dan terbuka dalam memajukan negaranya. Hal ini terlihat dari sektor ekonominya dimana saat ini China telah memperluas hasil produksinya di berbagai penjuru dunia. Kemudian melakukan investasi di berbagai sektor industri dan energi terbarukan serta terlibat dalam organisasi ekonomi seperti WTO (World Trade Organization), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) hingga CELAC (China-Community of Latin American and Caribbean States), dll.

Dengan keterlibatan China dalam berbagai institusi/organisasi baik di tingkat regional maupun internasional ini, maka secara tidak langsung China juga telah memperoleh legitimasi di dunia internasional. Sehingga dapat dikatakan China dapat memberikan pengaruh politiknya di organisasi maupun kawasan tersebut. Di sisi militer, negeri tirai bambu ini telah menaikkan anggaran pertahanannya hingga 7,5% dari tahun lalu (CNN, 2019). Peningkatan anggaran ini diperuntukkan untuk riset pengembangan ilmu dan teknologi pertahanan, pendirian pangkalan militer serta memperbanyak alutsista seperti jet tempur, rudal dan kapal induk.

Salah satu fokus Xi Jinping adalah membuat strategi ekonomi agar China mampu menjadi negara *great power*. Hal ini seperti yang diimpikan masyarakat China yakni *Chinese Dream*. Implikasinya, Xi akan menjalankan pemerintahannya yang berfokus pada peningkatan ekonomi yang berbasis inovasi (Cipto, 2018). China juga mengikutsertakan peran kelas menengah China untuk menerapkan "*going out*" strategi. Yaitu sebuah gagasan untuk melakukan investasi di luar negeri serta mendukung konektivitas global dan ekosistem digital. Di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden China, Xi Jinping sudah terlihat agresif dalam membuat serangkaian kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi China.

Salah satu inovasi Xi Jinping yang menarik perhatian dunia internasional pada tahun 2013 adalah strategi *One Belt One Road* (OBOR). Program ini diperkenalkan Xi di Kazakhstan dan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi. OBOR berupaya untuk menghubungkan kawasan Eurasia melalui pembangunan infrastruktur, perluasan perdagangan, dan investasi langsung (Chaisse & Matsushita, 2018). Pada 7 September 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev bahwa China dan Eurasia dapat dipersatukan melalui jalur ekonomi sutra (*The Silk Road Economic Belt*). Jalur ini bertujuan untuk membangun koneksi darat dari Asia Tenggara kemudian melewati China dan bermuara di Eropa Barat.

Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2013 dan bertempat di Gedung Parlemen Indonesia, Presiden Xi Jinping merekomendasikan pembentukan rute baru Jalan Sutra Maritim abad 21 atau *The 21st Century Maritime Silk Road* (Chaisse & Górski, 2018). Rute ini akan mengkoneksikan China dengan wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, hingga Eropa. Strategi OBOR ini terinspirasi dari sejarah masa lalu China yang menyalurkan hasil produksi domestiknya ke luar negeri melalui jalur perdagangan sutra (*Silk Road*). Di era itu jalur sutra tidak hanya mempermudah perdagangan saja tetapi rute ini juga membuka gerbang untuk pertukaran filsafat, kepercayaan agama, sains, bahasa, dan budaya.

Setelah dua tahun berjalan, Xi kemudian mengubah nama OBOR menjadi Belt and Road Initiative (BRI). Tidak jauh berbeda dengan OBOR, BRI juga

memiliki 2 elemen primer yaitu *The Silk Road Economic Belt* (jalur darat) dan *The 21st Century Maritime Silk Road* (jalur laut) (Chaisse & Matsushita, 2018). *Silk Road Economic Belt* merupakan sebuah proyek pembangunan jalur lintas darat berupa jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Asia Tengah dan Eropa ke bagian barat China. Untuk mengkoneksikan jalur laut (pelabuhan dan kereta cepat), China menginisiasikan *the 21st Century Maritime Silk Road* yang membentang dari Asia Tenggara sampai di benua Afrika.

Hingga saat ini proyek BRI telah melintasi semua benua mulai dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika. Bahkan China mulai melirik benua Arktik untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Laurenceson, Van Nieuwenhuizen, & Collinson, 2017). Sejak program ini diluncurkan, BRI menjadi prioritas kebijakan luar negeri China dan perluasan ekonomi internasionalnya. Bahkan pada Kongres Nasional ke-IX PKC di Beijing pada bulan Oktober 2017 menegaskan bahwa BRI akan menjadi titik fokus kebijakan Xi Jinping sampai tahun 2022.

Dengan demikian inisiatif "Belt and Road" yang diprakarsai Presiden Xi Jinping akan menjadi sebuah "gerbang" bagi China untuk melandasi kebangkitan China di abad ke-21. Sejalan dengan itu China juga akan mempromosikan kepentingan nasionalnya dengan cara mengintegrasikan diri ke dalam dunia internasional. Harapannya China dapat memperkuat pengaruhnya baik dalam sektor ekonomi, politik maupun budayanya.

Tujuan dari proyek BRI China ini adalah untuk mempromosikan ekonomi, memperluas kerja sama regional, meningkatkan investasi China dalam skala besar. Upaya ini diharapkan dapat merangsang permintaan ekonomi di luar negeri, mengurangi kelebihan produksi serta untuk menyelesaikan masalah penurunan permintaan produk. Di tahun 2015 China mencatat pengeluaran sebesar USD 40 miliar untuk proyek BRI ini. Oleh karena itu sejumlah negara di seluruh dunia berupaya untuk ikut serta dalam proyek pembangunan BRI. Presiden Xi mengklaim bahwa saat ini 62 negara telah aktif menjadi bagian dari proyek BRI. Dimana 30 negara secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama BRI pada pertengahan

2016. China juga mengklaim telah membentuk 75 zona kerja sama ekonomi di luar negeri di 35 negara BRI (Hui, 2016).

China membentuk enam koridor kerja sama untuk menghubungkan perdagangan ke daratan Asia dan Eropa. Enam koridor ini diantaranya :

- 1. China-Pakistan Economic Corridor (CPEC): Pakistan
- Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIMEC):
   Bangladesh, India, Myanmar
- 3. China-Central Asia-West Asia Economic Koridor (CICPC): Uzbekistan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turki, Turkmenistan
- 4. China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC): Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
- 5. China-Mongolia-Russia economic Corridor (CMREC): Mongolia, Rusia
- 6. New Eurasia Land Bridge Economic Corridor (NELB): Belarus, Republik Ceko, Polandia, Kazakhstan, Jerman dan Rusia



Gambar 2.1 Peta Jalur Koridor BRI Sumber: (Raymon Krishnan, 2017)

Dari berbagai proyek yang telah disepakati China baik secara bilateral maupun multilateral ini dapat disimpulkan bahwa, saat ini China telah mampu memenuhi produksi dalam negerinya. Oleh karena itu China berupaya untuk memasarkan produksi manufakturnya ke luar negeri demi perluasan pasar industri serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui jalur sutra ini. Prakarsa proyek BRI juga mengindikasikan bahwa China akan memiliki pengaruh geopolitik yang kuat di kawasan. Oleh sebab itu apabila strategi BRI ini berhasil, maka kesempatan China untuk menjadi negara adidaya akan semakin terbuka lebar.

Gagasan jalur sutra abad 21 ini menekankan pada misi serta visi BRI untuk mengembangkan jaringan jalur darat, laut, dan udara yang efisien dan aman. Kerjasama BRI berlandaskan asas "saling percaya, persamaan dan saling menguntungkan, keterbukaan, inklusif dan toleransi, serta mengedepankan win-win solution" (Anam & Ristiyani, 2018). Selain itu, penting untuk dicatat bahwa gagasan tentang konektivitas mengalami perubahan luar biasa di abad kedua puluh satu. Konektivitas tidak lagi terbatas pada jalan, rel, dan laut. Melainkan konektivitas virtual yang menggabungkan keterbukaan, integrasi dan kecepatan menjadi satu dalam bentuk virtual secara *real time*. Di era industri revolusi 4.0 China juga mempertimbangkan integrasi pasar dan menghubungkan negara-negara di sepanjang jalur BRI dengan jaringan generasi berikutnya yakni infrastruktur digital dan jangkauan satelit.

#### 2.3 Prinsip Kerjasama China Dengan Negara Mitra BRI

Metode diplomasi China untuk mencapai tujuan nasionalnya yakni dengan menggunakan kekuatan ekonomi berupa investasi dan bantuan luar negeri. Hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar, mengingat pertumbuhan ekonomi China satu dekade terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Investasi China di luar negeri terus berkembang sesuai dengan meningkatnya perekonomian China.

Selain di kawasan Asia dan Eropa, kini China telah melebarkan investasinya di kawasan Afrika, Amerika hingga lautan Arktik. Pada Tahun 2017, menurut data

(China Power, 2018) menunjukkan investasi luar negeri/FDI China semakin besar ke berbagai benua lain seperti Amerika Utara & Eropa, Amerika Latin & Karibia, Asia-Oceania, dan Afrika.

Strategi kebijakan luar negeri China di abad ini lebih proaktif namun tetap tidak melakukan konfrontasi. Hal ini dapat terlihat dari citra China yang tidak agresif dan mudah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Prinsip ini mencerminkan kepentingan nasional China dan PKC melalui keseimbangan internal dan *soft power* Amerika. Setelah berakhirnya perang dingin, China berupaya keras untuk mempromosikan pembangunan ekonomi demi membendung kekuatan AS. Prinsip ini semakin dipertegas pasca lunturnya komunisme di China sehingga PKC menjadikan landasan ini untuk mempertahankan legitimasinya melalui politik kesejahteraan.

Menurut beberapa pengamat politik dan ekonomi internasional, strategi investasi dan pinjaman dana dari China di berbagai belahan dunia dianggap tidak rasional dan kurang memberikan keuntungan bagi China (Kaplan, 2016). Hal ini dikarenakan China berinvestasi atau memberikan pinjaman dana ke negara berkembang yang belum stabil secara politik maupun ekonomi. Pengamat internasional ini khawatir negara peminjam tidak dapat mengembalikan bantuan dana kepada China dan kemudian aset yang telah dimiliki negara tersebut diserahkan kepada China atau popular dengan istilah jebakan utang (*Debt-trap*).

Namun pada prakteknya, China tidak bergeming dengan asumsi tersebut dan semakin memperluas "going out strategy" dengan memberikan investasi dan bantuan dana untuk mencari sumber energy di kawasan Asia, Eropa, Afrika hingga Amerika (Arsht, Avendano, Melguizo, & Miner, 2017). China berdalih bahwa kerja sama ini murni untuk tujuan perdagangan dan membantu negara peminjam untuk meningkatkan ekonomi negaranya (Davies, 2013). Dalam melakukan kerja sama, China tidak akan terlibat dalam urusan domestik negara tersebut. Hal ini dikarenakan China memiliki prinsip untuk menghargai kedaulatan negara peminjam. Prinsip ini tercantum dalam kebijakan investasi asing China. Di dalam

dokumen itu juga termuat pihak-pihak yang membantu China dalam menyalurkan investasi asingnya.

#### 2.4 Lembaga Penyedia Dana Bagi BRI

Dalam prakarsa BRI, China telah jauh lebih dahulu mempersiapkan lembaga keuangan. Lembaga ini berfungsi sebagai aliran dana bagi negara yang telah menandatangani kerja sama proyek BRI. Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi proyek BRI ini dengan mengerahkan bank-bank milik negara dan swasta. Beberapa bank ini diantaranya *Export Import Bank* (Exim,1994), *New Development Bank* (CDB,2013), *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB,2014) bagi benua Asia serta *Silk Road Fund* (SRF,2015). Bank ini berfungsi sebagai penyalur modal keluar, pengelola investasi di luar negeri serta berfungsi sebagai akusator perusahaan asing. Saat ini perusahaan-perusahaan China di luar negeri mendapat pendanaan dari bank pemerintah mencapai 80-90 persen (Zhou & Denise Leung, 2015).

Sejak 2013 hingga 2019 China telah memberikan bantuan dana sejumlah USD 38,9 miliar ke berbagai sektor di seluruh penjuru dunia. Sebagai gambaran India mendapatkan bantuan dana sejumlah USD 5,9 miliar. Sedangkan Indonesia memperoleh bantuan sebesar USD 795,6 juta di sektor infrastruktur digital. China tidak hanya memberikan bantuan finansial saja (Zaenudin, 2020). China juga mengirim bantuan teknis seperti para ahli, teknisi bahkan tenaga kerja melalui perusahaan teknologi dan komunikasinya. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2019, China telah melakukan kerja sama bilateral maupun regional dengan membangun infrastruktur digital di 30 negara (Wedell, 2020).

#### 2.4.1 China Export and Import Bank (Exim bank)

Pemerintah China memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan lokal yang berada dalam daftar prioritas (Davies, 2013). Kemudahan ini diantaranya akses pinjaman dengan harga di bawah pasar, kontribusi modal

langsung, dan subsidi terkait yang dengan program bantuan resmi. Exim merupakan salah satunya lembaga penyedia dana bagi program BRI.

China Export and Import Bank merupakan bank yang didirikan pada tahun 1994 dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah China. Exim bank berada di bawah pengawasan langsung State Council atau Dewan Negara. Exim bank berkantor pusat di Beijing dan telah memiliki lebih dari 20 cabang bisnis di China. Exim bank juga memiliki satu cabang di Paris dan dua kantor perwakilan di luar China tepatnya di Afrika Selatan dan Timur serta Kantor Perwakilan St. Petersburg (Devex, 2000). Exim bank telah menjalin hubungan perbankan dengan lebih dari 1.000 bank yang tersebar di seluruh dunia.

Tujuan utama didirikannya bank ini adalah untuk memfasilitasi ekspor dan impor produk-produk mekanik dan elektronik China. Produk-produk berteknologi tinggi ini dapat membantu perusahaan-perusahaan China untuk mempromosikan kerja sama ekonomi internasional dan perdagangan asing (Leng, 2019). Hingga tahun 2019 *Exim bank* telah menyediakan lebih dari 1 triliun yuan atau sekitar USD 149 miliar untuk lebih dari 1.800 proyek "*Belt and Road*."

#### 2.4.2 China Development Bank (CDB)

Tidak berbeda jauh dengan Exim Bank, *China Development Bank* (CDB) memiliki peran dalam menyediakan keuangan yang memungkinkan China berinvestasi dalam sektor sumber daya alam di luar negeri (Davies, 2013). Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk mencari pasar baru di luar negeri agar CDB tidak hanya beroperasi di ranah domestik saja.

China Development Bank (CDB) didirikan pada 1994 dan menjadi salah satu lembaga keuangan pembangunan terbesar di dunia. Bank ini awalnya didirikan sebagai bank negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan skala besar pemerintah. CDB berada di bawah yurisdiksi langsung Dewan Negara atau *People State Governance*. Pada bulan Desember 2008, CDB menjadi bank komersial, namun pemegang saham utamanya adalah Kementerian Keuangan China dan

Central Huijin Investment Corp. Kedua lembaga ini masih menjadi bagian dari departemen pemerintah China. Setelah restrukturisasi, CDB mempertahankan semua aset, kewajiban, dan bisnis bank kebijakan, termasuk RMB 300 miliar dalam modal terdaftar. Hingga saat ini China Development Bank memiliki 37 cabang primer dan 4 cabang sekunder di seluruh negeri. Diluar China, CDB memiliki 1 cabang lepas pantai di Hong Kong dan 10 kantor perwakilan yang tersebar di luar negeri (OECD, 2018). CDB menyediakan pembiayaan untuk pembangunan proyek domestik maupun baik itu pembangunan infrastruktur maupun di sektor industri dasar, energi hingga transportasi.

Sejak 2013 China Development Bank (CDB) telah menyediakan pembiayaan lebih dari USD 190 miliar untuk lebih dari 600 proyek rencana infrastruktur "*Belt and Road*" (China Dev. Bank, 2015). Berdasarkan laporan dari (OECD, 2018) menunjukkan bahwa CDB menyediakan fasilitas pembiayaan jangka menengah hingga jangka panjang yang melayani strategi pembangunan ekonomi dan sosial. Pada akhir 2018, aset CDB tumbuh mencapai RMB 16,2 triliun sedangkan saldo pinjaman mencapai RMB 11,68 triliun.

#### 2.4.3 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Pendirian *Asian Infrastructure Investment Bank* pada 2015 memperkuat kebijakan *Belt and Road* China. Pada 16 Januari 2016 Asian Investment Bank pertama kali beroperasi dan hingga sekarang memiliki 84 negara anggota (Gennari, 2017). Keanggotaan ini kemudian dibagi menjadi 40 anggota negara regional, 21 anggota negara non-regional, dan 23 negara masih dalam konfirmasi. Hingga tahun 2019, 24 proyek telah mencapai kesepakatan di berbagai departemen, dengan jumlah pinjaman USD 4,22 miliar. Dalam tulisannya Gennari juga menyatakan bahwa pelaksanaan *Asian Infrastructure Investment Bank* terbuka untuk semua negara. Akan tetapi AIIB lebih memprioritaskan anggota regional (Asia) daripada negara non-regional untuk tetap mempertahankan suara mayoritas Asia. Dengan demikian, AIIB telah mengantongi 75% suara anggota regional.

AIIB memiliki tiga klasifikasi pemungutan suara, yaitu pemungutan suara dasar (basic votes), pemungutan suara berbagi (share votes) dan pemungutan suara anggota pendiri (founding member votes) (AIIB, 2015, p. 5). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 28, ayat 2: "A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members". (AIIB, 2015, p. 16)

Dari dokumen tersebut diketahui bahwa *Basic votes* mengacu pada total suara yang diperoleh dari distribusi rata-rata di antara anggota. Jumlah saham *share votes* adalah sama dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing negara anggota. Sedangkan *founding votes* memiliki 600 suara per anggota pendiri. Sebagai anggota pendiri, China memiliki 27,84% saham, yang berarti bahwa China memiliki otoritas lebih dari 25% saham total, sehingga China memiliki hak veto atas keputusan penting yang memerlukan *supermajority*.

#### 2.4.4 Silk Road Fund (SRF)

Pada bulan November 2014, Xi Jinping mendeklarasikan pendirian Dana Jalur Sutra atau *Silk Road Fund*, SRF. Lembaga ini bertujuan untuk mendukung proyek investasi jangka menengah dan panjang. *Silk Road Fund* mulai beroperasi pada Februari 2015 dengan sumber daya USD 40 miliar (OECD, 2018). SRF menyediakan pendanaan untuk investasi di infrastruktur Asia mulai dari sektor sumber daya, industri hingga bantuan keuangan.

SRF menganut konsep keterbukaan, inklusivitas, saling menguntungkan, win-win solution. SRF juga mengikuti prinsip-prinsip marketisasi, internasionalisasi, dan profesionalisme. Aliran dana dari SRF bertujuan secara aktif untuk memperluas investasi dan membiayai peluang kerja sama. Metode yang digunakan yakni dengan mengadopsi metode investasi ekuitas jangka menengah hingga jangka panjang. SRF telah menandatangani lebih dari 20 proyek dan mendeklarasikan untuk berinvestasi lebih dari USD 8 miliar. Apabila di total investasi yang terlibat diperkirakan akan jauh melampaui USD 90 miliar. Dengan

total modal USD 40 miliar dan RMB 100 miliar, investasi SRF digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan energi (Yang, 2019). Seiring dengan proyek pembangunan, SRF juga mulai membina kerja sama di kawasan Asia, Eropa, Negara Rusia. Di masa mendatang SRF akan memperluas lagi cakupanya ke lebih banyak wilayah di kawasan Amerika dan Afrika.

Sejak 2016 SRF telah berkolaborasi dengan lembaga keuangan lain untuk mendanai pengembangan BRI. Lembaga dana ini diantaranya *Korea Development Bank, Japan Development Bank* dan *Asian Infrastructure Investment Bank*. Terlepas dari kolaborasi dengan lembaga keuangan resmi di Jepang dan Republik Korea, SRF juga telah menjalin kontak erat dengan perusahaan dan lembaga keuangan di Eropa dan Amerika Serikat termasuk *European Investment Bank* dan *General Electric*. Pada tahun 2017 SRF menerima peningkatan modal sebesar RMB 100 miliar. Sejalan dengan peningkatan investasi, SRF juga aktif membangun proyek investasi renminbi di luar negeri.

#### 2.5 Penutup

Kesimpulan pada Bab II ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan China dengan mitranya atau banyak negara didasarkan pada kepentingan China untuk melakukan ekspansi ekonomi. Kerjasama ini termasuk strategi-strategi ekonomi China seperti pemberian investasi dan pinjaman hutang. Investasi China ini hampir merata di seluruh dunia. Hal ini membuat China semakin semangat dalam mencapai strateginya. China berupaya untuk meningkatkan perekonomian domestik, membangun citra positif dan memperkuat posisinya di kawasan jalur sutra sekaligus. Itulah yang membuat China gencar melakukan diplomasi ekonomi ke kawasan Asia, Eropa, Afrika hingga ke kawasan Arktik. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi China yang semakin pesat ini maka perusahaan di China pun semakin gencar melakukan industrialisasi. Proses atau tahapan dari pertumbuhan industrialisasi teknologi dan munculnya program *Digital Silk Road* akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

#### **BAB 3 DIGITAL SILK ROAD**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data mengenai perkembangan teknologi China dari masa ke masa hingga diluncurkannya program *China's Digital Silk Road*. Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan perusahaan teknologi dan komunikasi yang terlibat di dalam upaya ekspansi teknologi China. Perusahaan ini diantaranya Baidu, Alibaba, Tencent, ZTE dan Huawei. Melalui peningkatan teknologi China yang semakin pesat ini akan memperkuat *bargaining position* China di sektor digital internasional.

#### 3.1 Perkembangan Industri dan Teknologi China

Sejak berdirinya Republik Rakyat China pada 1949, perkembangan China di bidang sains dan teknologi cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa fase (Wibowo, 2007). Di fase awal berdiri hingga tahun 1959 masyarakat China masih identik dengan kaum petani. Oleh karena itu sektor teknologi di periode ini adalah penciptaan industri yang mendukung sektor agrikultur. Fase kedua yakni pada tahun 1960 proses industrialisasi di bidang agrikultur mengalami stagnasi hingga akhir 1976. Memasuki periode ketiga dimana pemerintahan dipimpin oleh Deng Xiaoping, China mulai membuka diri dengan kerjasama luar negeri (Campell, 2013). Demi mendukung proses internasionalisasi ini Deng Xiaoping meluncurkan sebuah reformasi di bidang teknologi. Deng Xiaoping menekankan pada penelitian teknologi terbarukan yang independen dan berorientasi terhadap pasar.

Meneruskan kebijakan Deng Xiaoping, Pada tahun 2002 Ziang Jemin semakin gencar menggerakkan sektor teknologi untuk industrialisasi (Campell, 2013). Investasi cerdas China di bidang teknologi ini kemudian dapat diperdagangkan secara global guna meningkatkan ekonomi nasional. Sampai saat ini China telah menyumbang lebih dari 40 persen dalam transaksi teknologi digital secara global, 6 persen dalam ekspor layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) serta menginisiasi penetrasi *e-commerce* sebesar 15 persen (L. Zhang & Chen, 2019). Upaya ini kemudian mendorong pemerintah China untuk berinvestasi di bidang teknologi demi meningkatkan inovasi dalam diversifikasi produksi.

Pemerintah China meyakini bahwa untuk menjadi negara adidaya mereka harus menguasai sektor industri terutama teknologi. Oleh karena itu pemerintah China berupaya untuk selalu mendukung penelitian dan inovasi di bidang sains dan teknologi. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pemberian dana bantuan penelitian demi terwujudnya *self-sufficient technology*. Inisiasi ini kemudian dijadikan China untuk membuat regulasi tentang rencana pengembangan teknologi selama lima tahun yang dimulai pada tahun 2015. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong perusahaan China memproduksi 70 persen dari microchip yang akan digunakan oleh industri China pada tahun 2025 (Z. Zhang, 2020). Sejak saat itu, pemerintah telah mensubsidi perusahaan domestik dan perusahaan asing yang melakukan pindah operasi ke China. Pemerintah juga menganjurkan konsumen dalam negeri untuk membeli produk lokal.

Pada tahun 2018, China menyusul Amerika Serikat dalam hal jumlah total publikasi ilmiah. Pemerintah China telah berkomitmen dalam satu dekade ke depan akan mengeluarkan anggaran sebesar USD 150 miliar (Hodiak, 2020). Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan China dalam mendesain dan memproduksi mikroprosesor canggih. China juga telah mengakuisisi beberapa teknologi dari luar negeri.

#### 3.2 Ambisi Digital China

Konektivitas adalah tujuan utama dari adanya proyek BRI. Namun di abad 21 ini selain sektor ekonomi dan politik, inovasi di bidang teknologi digital telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi akan mengarah kepada revolusi komunikasi serta berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan proses digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang masif selama dua dekade terakhir (Lele & Roy, 2019). Ibarat dua sisi pada sebilah pisau, era digitalisasi ini memberikan tantangan sekaligus peluang untuk memenuhi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di satu sisi, implementasi revolusi industri 4.0 dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam proses produksi. Namun di sisi lain, revolusi industri ini dapat mengancam keamanan negara dan berdampak kepada efisiensi tenaga kerja manusia.

Meskipun konsep konektivitas dalam BRI telah membuat kemajuan yang baik selama beberapa tahun terakhir, namun konektivitas digital masih kurang diperhatikan oleh beberapa pengamat (Lele & Roy, 2019). Kebanyakan dari mereka hanya berfokus pada infrastruktur fisik dan proyek-proyek seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api saja. Namun dibalik pembangunan fisik itu, China berencana untuk mendominasi sektor teknologi digital demi mendorong terwujudnya transformasi di segala sektor industri (Kelkar, 2018). Pengembangan di sektor teknologi dan komunikasi akan menjadi pondasi penting untuk menjadi penggerak utama terjadinya digitalisasi di semua lini kehidupan manusia. Oleh karena itu DSR dapat dikatakan sebagai sebuah payung yang menaungi berbagai macam kerjasama baik itu sektor digital, telekomunikasi, tambang, agrikultur, otomotif, pendidikan, transportasi, infrastruktur dll.

Ambisi China untuk menjadi negara adidaya teknologi didorong oleh dua motif utama yaitu politik dan ekonomi. Bagi PKC, era digital menjadi sebuah kesempatan emas China untuk turut serta dalam dinamika tatanan global. Dalam sejarahnya, China pernah menjadi negara yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selama berabad-abad (Shi-Kupfer & Mareike, 2019). Namun setelah Eropa mengalami revolusi industri, Tiongkok mengalami masa semi-kolonialisme, hingga akhirnya pada 1949 PKC mengambil alih kekuasaan. Oleh karena itu saat ini PKC berupaya untuk membalikkan keadaan dan mengembalikan masa kejayaannya dengan revolusi teknologi yang didukung oleh *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi digital lainnya.

Upaya China mendorong kemajuan teknologi yang pesat didasari oleh motif untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan model bisnis industri yang inovatif. Lebih lanjut China juga memperluas penggunaan produk infrastruktur digital, telekomunikasi dan perdagangan elektronik secara global. Oleh karena itu digitalisasi dianggap penting untuk menciptakan inovasi berbasis persaingan dan ekonomi bernilai tambah tinggi. Hal ini diperkuat dengan peran pemerintah yang ketat dalam membatasi pergerakan perusahaan asing di pasar domestik. Upaya ini kemudian berdampak pada pertumbuhan substansial di sektor logistik, *e-commerce*, *fintech*, *autonomous driving*, dan kesehatan digital serta menjadikan China unggul dalam produk AI, *blockchain* dan digital kuantum.

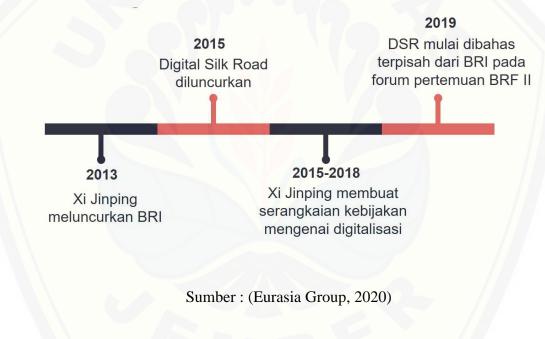
Digitalisasi China mencakup agenda modernisasi ekonomi yang ambisius dan untuk mempertahankan kedaulatan PKC. Bagi PKC era digital menawarkan kesempatan untuk mengembalikan posisi China dalam penguasaan inovasi ilmiah dan teknologi di tatanan global (Shi-Kupfer & Ohlberg, 2019). Lebih lanjut legitimasi PKC sangat bergantung pada kinerja ekonomi. Stagnasi atau bahkan menurunya angka pertumbuhan dapat menimbulkan risiko serius bagi kekuasaan yang dimiliki. Oleh karena itu pelaksanaaan DSR dianggap penting bagi China dalam memenuhi tujuan jangka panjang yang bersifat menyeluruh. Cakupan interkontinental dari strategi ini membuat batas antara politik domestik dan politik luar negeri menjadi bias.

#### 3.3 Digital Silk Road

Pada September 2013 Presiden Xi Jinping secara resmi meluncurkan proyek BRI dalam pidato di Universitas Nazarbayev Kazakhstan (Anam & Ristiyani, 2018). Pada bulan Maret 2015 tepatnya setelah proyek BRI berjalan selama dua tahun, *The National Development and Reform Commission (NDRC)*, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan untuk pertama kalinya menerbitkan buku putih yang menjabarkan visi untuk DSR (Yu, Rizzi, Tettamanti, Fabio, & Guo,2018). Kebijakan ini menjadi landasan pengembangan proyek "an information"

silk road". Kebijakan ini memuat pembentukan jaringan kabel bilateral, rencana proyek kabel bawah laut lintas benua dan peningkatan saluran satelit.

Dalam kerangka *Digital Silk Road*, China memulai proyek infrastruktur digital dengan membangun jaringan kabel yang menghubungkan daratan Asia, Eropa dan Afrika (Dallas & Washington, 2019). China juga telah membuat kemajuan dengan membentuk standar internasional untuk teknologi terbarukan. Metodenya yaitu dengan mendorong partisipasi industri serta mengamankan posisi kepemimpinan di badan pengaturan standar internasional. Implikasinya, saat ini China menjadi negara terdepan di Asia dalam standarisasi teknologi blockchain, 5G dan *Internet of Things* (IoT).



Gambar 3.1 Garis waktu inisiasi DSR

Dua bulan berselang tepatnya pada Juli 2015 NDRC mengeluarkan "Guideline on Boosting International Cooperation in Production Capacity and Equipment Manufacturing" (Mori, 2019). Melalui kebijakan ini China menekankan bahwa industri telekomunikasi menjadi salah satu dari 13 sektor utama yang diperlukan dalam meningkatkan kerja sama industri internasional. Kemudian pada September 2015 NDRC, The Cyberspace Administration of China (CAC), Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) dan pemerintah provinsi Guangxi menekankan adanya kerja sama cyberspace antara China dan negara ASEAN.

Xi Jinping memperkenalkan strategi DSR untuk pertama kalinya memisah pembahasan DSR pada *Belt and Road Forum* II (BRF) di Beijing. Xi Jinping menegaskan pentingnya menciptakan "digital silk road of the 21st century" (Sun, 2018). Xi juga menyerukan pentingnya integrasi ekonomi digital, AI, nanoteknologi, dan kuantum komputasi di wilayah perbatasan sambil memajukan pengembangan *big data*, komputasi awan, dan kota pintar di dalamnya BRI.

Sejak pertama kali diluncurkan program DSR lebih banyak berfokus pada pembangunan di sektor domestik dan kawasan Asia. Progres pembangunan ini juga menunjukkan tren yang positif. Oleh karena itu China berupaya untuk memperluas jaringan DSR di luar Asia. Kesempatan ini pun terjadi pada bulan September 2018 dimana Xi Jinping melakukan pertemuan tahunan dengan para pemimpin negara di kawasan Afrika atau umum dikenal dengan forum Kerjasama China-Afrika (FOCAC) (Eurasia Group, 2020). Pada pertemuan tersebut kedua belah pihak menyetujui pembangunan masif pada teknologi komputasi awan, *big data, smart city*, kabel bawah laut dan pusat data di kawasan Afrika. Kemudian pada April 2019 untuk pertama kalinya pembahasan tentang DSR dilakukan secara terpisah pada pertemuan BRF yang kedua. Hasilnya terdapat hampir 30 negara partisipan di program DSR termasuk Kuba, Mesir, Prancis, dan Serbia.

Gagasan Xi tentang digitalisasi ini diintegrasikan dalam proyek BRI yang kemudian dikenal dengan istilah *Digital Silk Road* (DSR). *Digital Silk Road* merupakan salah satu bagian dari kebijakan BRI yang berfokus untuk mempromosikan konektivitas digital dan menjadikan China sebagai negara adidaya dalam teknologi digital (Hao, 2019b). DSR mulai diperkenalkan di buku putih yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan Reformasi Nasional China, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.

[China] should jointly advance the construction of cross-border optical cables and other communications trunk line networks ... and create an information Silk Road ... build bilateral cross-border optical cable networks at a quicker pace, plan transcontinental submarine, optical cable projects, and improve spatial (satellite) information, passage ways to expand information exchanges and cooperation. (Keshav Kelkar, 2018)

Sejak *Digital Silk Road* diperkenalkan, China telah menggelontorkan USD 79 miliar untuk mengekspansi strategi digitalnya (Deloitte, 2019). Sebagai gambaran, pembangunan jaringan telekomunikasi 5G hanyalah salah satu contoh bagaimana China membangun pusat inovasi digital. Presiden Xi Jinping telah menekankan pentingnya China menjadi pemimpin dalam teknologi yang muncul termasuk kecerdasan buatan (AI), nanoteknologi, komputasi kuantum, *big data*, komputasi awan dan *smart city*.

Saat ini China telah menghabiskan setidaknya sepuluh kali lebih banyak untuk *Research and Development* (R&D) kuantum daripada Amerika Serikat; estimasi pembangunan ini mencapai USD 50 miliar. Pada tahun 2018 di sektor AI, China telah mengajukan 30.000 paten. Lebih banyak 2,5 kali lipat dari Amerika Serikat. China juga telah mengumumkan rencana untuk berinvestasi USD 411 miliar dalam meningkatkan sistem telekomunikasi menjadi 5G antara tahun 2020 dan 2030 (Shi-Kupfer, Kristin; Ohlberg, 2019). Pada tahun 2019 China meningkatkan investasi sebanyak USD 50 miliar dalam pembangunan jalur sutera digital. Diantaranya kabel serat optik, jaringan seluler, stasiun relay satelit, pusat data, dan kota pintar. Hal ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya negara yang menandatangani kerjasama dengan China melalui BRI. Melalui kebijakan perdagangan dan investasinya ini, maka penguasaan teknologi China akan berpengaruh pada tata kelola internet global.

Demi mewujudkan program ambisius DSR, China telah membentuk berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung tujuan DSR. Diantaranya

Penetapan undang-undang dasar dan standar mengenai kredit sosial atau *Social Credit System Construction Plan (2014-2020)* pada tahun 2014 oleh Dewan Negara China (New America, 2017). Kebijakan ini akan mengembangkan sistem yang mendorong warganya untuk melindungi kepercayaan sosial di bidang pemerintah, transaksi, informasi keuangan, konstruksi dan lalu lintas, e-commerce, statistik, dan lain-lain.

Satu tahun berselang kebijakan Made in China 2025 (MiC 2025) yang diluncurkan pada Mei 2015 menjadi sebuah rencana kebijakan industri paling

komprehensif (Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ives, & Conrad, 2016). Dalam pengimplementasianya MiC memuat 10 industri inti yang memperkuat transformasi digital industri. Diantaranya yakni AI, Cloud Computing, dan Big Data. Ambisi digital ini berupaya untuk menjadikan China sebagai negara terdepan dalam bidang teknologi. Dalam waktu yang bersamaan juga akan memperkuat dominasi China di tatanan global dengan membentuk standar dan norma global yang baru.

Pada bulan Agustus 2018 Dewan Negara menetapkan *Big Data Development Action Plan* (AFD China, 2020). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengumpulkan data tentang kepercayaan, keuangan, pendapatan pajak, pertanian, impor dan ekspor, dan lainnya dalam lima hingga sepuluh tahun kedepan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan model sosial pemerintahan yang baru. Mempromosikan publikasi data pemerintah. Memperluas dan mempromosikan analisis dasar data seperti populasi, informasi perusahaan, dan informasi sumber daya alam. Mempromosikan penggunaan *big data* di sektor industri dan pertanian.

Untuk mempertagas langkahnya China menerbitkan kebijakan "Internet+". Kebijakan ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian Industri dan Informasi Teknologi (Wang, Chen, Guo, Yu, & Zhou, 2016). Melalui gagasan ini China berupaya untuk mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk membangun aplikasi dan platform komputasi data analitik. Perusahaan ini juga akan mengembangkan (cloud computing) komputasi awan dengan skala yang besar dan kompetitif untuk bersaing dalam perdagangan internasional.

Lebih lanjut Dewan Negara China menetapkan 13th Five-Year Plan National Informatization. Rancangan lima tahun ini menjadi dasar China untuk memperjelas target khusus untuk tahun 2020 (State Council, 2016). Sektor ini diantaranya skala industri terkait informasi, jumlah paten untuk penemuan, dan tingkat cakupan dasar infrastruktur. Kebijakan ini erat kaitanya dengan kebijakan seperti "Big Data", "Internet Plus", "Entrepreneurship Policy", dan "Made in China 2025".

Demi mengupayakan pengembangan AI secara optimal, China berambisi menjadi perintis sekaligus pemain utama di industri ini. Oleh karena itu China

mengeluarkan *New Generation Artificial Intelligence Development Plan* pada Agustus 2017 (Wu et al., 2020). Hal ini bertujuan untuk menjadikan China sebagai negara dengan tingkat riset pengetahuan, teknologi dan dan pengimplementasian tertinggi pada tahun 2030. Pada tahun 2019 China meluncurkan *Digital Village Development Strategic Plan* (Xinhua News Agency, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan digitalisasi ekonomi di masyarakat pedesaan, melakukan modernisasi pertanian, dan revitalisasi desa.

China juga telah membentuk standar internasional untuk teknologi baru demi mengamankan posisi kepemimpinan di beberapa badan pengaturan standar internasional. Pada 2015 misalnya, PKC membentuk "Special Leading Small Group on the Major Project of Standardization alongside the 'Belt and Road Initiative" (Permanent Mission Of The People's Republic Of China To The United Nations, 2019). Prioritas utamanya yaitu untuk mempercepat promosi standar homegrown China di kawasan China bagian utara, Mongolia, dan Rusia. Pada Juni 2018, China's IoT Reference Architecture (ISO/ IEC 30141) telah disetujui oleh anggota ISO (Shi-Kupfer & Mareike, 2019). Saat ini China berhasil mengamankan tiga posisi kunci di badan pengaturan standar internasional yaitu International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) dan International Telecommunications Union (ITU).

#### 3.3.1 Tujuan China dalam Digital Silk Road

DSR dapat dikatakan sebagai sebuah inisiatif yang didorong oleh aliansi antara pemerintah China pemerintah dan perusahaan China. Gagasan ini memiliki lima tujuan yaitu mencapai kepentingan nasional China dengan mengatasi kelebihan kapasitas industri, memfasilitasi ekspansi teknologi dari China, mendukung penginternasionalan mata uang renminbi, menciptakan digital infrastruktur yang China sentris serta mempromosikan globalisasi yang inklusif melalui dunia maya.

#### 1. Memperluas pasar industri

Pada tahun 2015 kelebihan kapasitas kabel serat optik China melebihi 50% dari permintaan pasar sehingga China sangat membutuhkan pasar eksternal. Bahkan di sebuah majalah lokal China CEO dari ZTE (penyedia peralatan telekomunikasi) meminta agar pembangunan "jalur informasi sutra" segera dipercepat (Shen, 2018). Selain itu, perusahaan teknologi juga berharap melalui BRI ini mereka dapat meningkatkan permintaan akan produk dan layanan TIK digital, karena infrastruktur non-digital (kereta api, bandara, dan jaringan pipa) perlu diintegrasikan dengan teknologi digital agar dapat terkontrol dan berjalan lebih efisien.

Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini telah diberi peran khusus dalam kebijakan digitalisasi yang telah disebutkan diatas. China mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk membangun aplikasi dan platform komputasi data analitik dan (cloud computing) komputasi awan dengan skala yang besar dan kompetitif untuk bersaing dalam perdagangan internasional (Shi-Kupfer & Ohlberg, 2019). Alibaba, misalnya, telah memperluas pusat datanya dan layanan Cloud Alibaba di luar negeri. Hingga saat ini Cloud Alibaba telah banyak digunakan oleh perusahaan China dalam operasi mereka di luar negeri sehingga membantu pemerintah China dalam menghemat biaya operasional. Alibaba kini berupaya memperluas pusat datanya ke setidaknya tiga negara yang dicakup oleh BRI (India, Indonesia dan Malaysia) (Diamandis, 2018a). Selain Alibaba, Huawei dan ZTE juga terpilih sebagai mitra resmi pemerintah dalam teknologi komunikasi 5G dan dipandang sebagai instrumen dalam menerapkan standar 5G yang dipimpin China. Sebagai mitra resmi, Huawei dan ZTE diberikan kontrak untuk membangun jaringan komunikasi di negara mitra BRI.

#### 2. Internasionalisasi mata uang Renminbi

Aliran dana yang mendukung jalannya program BRI berasal dari beberapa bank diantaranya *Export Import Bank* (Exim), *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB), *New Development Bank* (NDB) *dan Silk Road Fund* (SRF) (Stanzel

et al., 2017). Hingga saat ini, pertukaran data di seluruh sistem keuangan global telah didominasi oleh institusi yang dipimpin atau dikendalikan AS. Oleh karena itu BRI dapat membantu membangun jaringan data keuangan transnasional yang memberikan China mempunyai lebih banyak otoritas, meningkatkan sirkulasi global Renminbi (RMB), dan membantu China menghindari pengawasan eksternal.

Pada tahun 2015, sistem pembayaran antar bank lintas batas mendukung mata uang RMB dalam layanan kliring pembayaran dan perdagangan internasional. Hal ini dipandang sebagai alternatif dari sistem *SWIFT* yang berpusat di AS. Bahkan Salah satu perusahaan China, IZP Technologies telah menciptakan "*Globebill*". Yakni sebuah solusi pembayaran dan penyelesaian lintas batas khusus negara yang telah tergabung dalam BRI (Shen, 2018). Tujuannya yakni untuk membantu melakukan likuidasi langsung antara Renminbi dan mata uang lainnya. Hingga saat ini BRI telah menawarkan kartu kredit dua mata uang di 30 negara mitranya.

#### 3. Infrastruktur digital yang berpusat di China

Shen mengemukakan bahwa melalui *Digital Silk Road*, China bertujuan untuk menciptakan infrastruktur jaringan transnasional sendiri melalui kapal selam, terestrial, dan satelit di sepanjang negara-negara BRI (Shen, 2018). Hal ini dapat dilihat dari upaya China untuk memperluas Sistem Satelit Navigasi BeiDou. BeiDou diharapkan menjadi sebuah alternatif sistem navigasi *Global Positioning System* (GPS) dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah China bertujuan untuk menyediakan layanan navigasi BeiDou ke negara-negara BRI mulai tahun 2018. China berharap sistem ini akan berkembang secara global pada tahun 2020. Salah satu tujuan utama sistem BeiDou adalah China berupaya untuk mengakhiri ketergantungan militer pada sistem GPS yang berpusat di AS (Kelkar, 2018). Bahkan China telah mendapatkan persetujuan dari beberapa pemerintah negara BRI untuk menggunakan sistem tersebut dalam operasi pemerintah dan militer mereka.

#### 4. Globalisasi yang inklusif

Sebagian peneliti berpendapat bahwa BRI diluncurkan pada saat yang tepat untuk meningkatkan citra China di dunia internasional. Di tengah meningkatnya hegemoni dari AS, China kemudian berkomitmen untuk meningkatkan zona perdagangan bebas global dan ekonomi (Shen, 2018). Tujuan dari zona ini agar lebih meningkatkan kerjasama yang "bersemangat, inklusif, dan berkelanjutan."

Dalam sebuah artikel di jurnal partai komunis China, seorang sarjana Hubungan Internasional China mengkarakterisasi sejarah globalisasi menjadi tiga era: globalisasi 1.0, 2.0, dan Globalisasi 3.0 saat ini. Globalisasi 1.0 ditopang oleh Jalur Sutra kuno, sedangkan globalisasi 2.0 dipimpin oleh kekuatan kolonial barat dan industri, sementara BRI memberi jalan bagi Globalisasi 3.0 (Pieterse, 2015). Dengan teknologi internet seperti *big data* dan *smart city* maka China telah mengembangkan Globalisasi 4.0 di tanah mereka sendiri. Teknologi ini kemudian meningkatkan konetivitas negara-negara *landlock*<sup>2</sup> dan berkembang ke pasar global secara efisien. Dengan demikian sistem perdagangan dan investasi internasional China menjadi lebih inklusif. China kemudian memandang teknologi digital ini sebagai upaya pemberdayaan bagi negara-negara berkembang agar siap menghadapi globalisasi inklusif yang dipimpin China.

#### 5. Mempromosikan kedaulatan internet

China juga berupaya memperluas inisiasinya tentang *internet sovereignty* atau kedaulatan internet. Dalam acara *World Internet Conference* pada tahun 2017, Wang Huning, seorang pejabat publik China terkemuka, mengatakan bahwa "China siap untuk mengembangkan aturan dan sistem tata kelola internet baru untuk melayani semua pihak dan mengatasi ketidakseimbangan saat ini" (Hornby, 2017). Kedaulatan internet menunjukkan bahwa internet harus dikendalikan oleh masingmasing negara. Karena setiap negara memiliki hak untuk mengatur internet sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Negara yang terkurung oleh daratan karena tidak memiliki batas laut

tanpa campur tangan asing. Melalui kedaulatan internet, China mempertahankan praktik pembatasan konektivitas yang ketat di belahan dunia lain serta mengupayakan pemerintah di negara lain untuk berpikiran yang sama dalam membangun arsitektur yang serupa.

Penggunaan internet yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini sangat menarik bagi pemerintah yang berusaha untuk membatasi warga negaranya dalam berpendapat secara daring. Dengan demikian tidak mengherankan apabila mitra utama China dalam pengembangan *Digital Silk Road* ini adalah negara-negara di mana akses internet sangat dibatasi oleh pemerintah lokal.

#### 3.3.2 Penelitian dan Pengembangan (Research and Development, R&D)

Digital Silk Road merupakan bagian dari ambisi jangka panjang China untuk menjadi pemimpin dalam bidang sains dan inovasi pada tahun 2050. Demi mencapai tujuan ini, China telah menginvestasikan sejumlah USD 300 miliar atau hampir setara dengan 2,2% PDB untuk R&D. Dengan persentase tersebut, China hanya terlampau oleh Amerika Serikat yang menginvestasikan pengeluaran litbang senilai USD 477 miliar. Meskipun pertumbuhan PDB China masih tertinggal jauh di antara Korea Selatan (4,3%), Israel (4,2%) dan Jepang (3,4%) (Dace, 2020a). Namun, pertumbuhan investasi R&D di China jauh melebihi AS dan Eropa. Dengan demikian, China muncul sebagai kekuatan baru dibidang sains dan teknologi.

Bersamaan dengan pengumuman resmi dari strategi "*Made in China 2025*", China berupaya untuk menuju transformasi digital skala besar (Shi-Kupfer, Kristin; Ohlberg, 2019). China melakukannya dengan meningkatkan anggaran di bidang teknologi dan berinvestasi di berbagai macam infrastruktur digital. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pembangunan infrastruktur dari roadmap 2017 di sektor 5G, *blockchain*, AI, *big data* dan komputasi kuantum.

Investasi China dalam R&D juga dapat tercermin dalam jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkannya. Hingga saat ini China menempati urutan kedua dalam hal

publikasi jurnal setelah AS. Dalam bidang *Artificial Intelligence* (AI), peneliti dari China menerbitkan lebih banyak jurnal daripada peneliti AS. Pada tahun 2017 jumlah peneliti dan insinyur AI sebanyak 204.575 peneliti. 13% diantaranya berasal dari AS sedangkan dibawah 9% berasal dari China (Dace, 2020). Meskipun demikian, beberapa pihak menilai bahwa kualitas jurnal yang diterbitkan di China telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Jumlah ini diprediksi akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun kedepan. Pada tahun 2020, diperkirakan China akan berada di level yang sama dengan AS dalam hal kualitas dan kuantitas jurnal yang diterbitkan. Dengan demikian dapat menempati posisi yang kuat untuk meningkatkan pengembangan teknologi inovatifnya.

#### 3.3.3 Perusahaan Telekomunikasi Mitra DSR

#### 1. Baidu

Baidu adalah perusahaan teknologi China yang didirikan pada tahun 2000. Perusahaan ini berfokus pada layanan internet seperti periklanan online dan layanan pemasaran serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pada tahun 2010 China melarang warga negaranya untuk menggunakan layanan pencarian Google (Jia & Winseck, 2018). Hal ini kemudian menjadikan Baidu sebagai mesin pencari nomor satu di China. Baidu kemudian memperluas layanan internetnya seperti peta online, pembayaran digital, streaming video, dan pengiriman makanan (Diamandis, 2018a). Pada tahun 2017, Baidu mulai melakukan perubahan besar pada jajaran direksi dan meningkatkan R&D di bidang AI.

#### 2. Alibaba

Alibaba merupakan perusahaan perdagangan lokal China yang didirikan oleh Ma Yung pada 1999. Sebagai salah satu platform perdagangan terbesar di dunia, Alibaba mendukung penuh program BRI untuk mengekspansi produknya dan mendigitalisasi kegiatan perekonomian secara global (Jia & Winseck, 2018). Dukungan ini diantaranya mendirikan platform perdagangan dunia elektronik

(electronic world trade platform, e-WTP). E-WTP dirancang untuk memberikan tarif dasar minimal, bea cukai cepat, dan dukungan logistik kepada negara pengadopsi. Sejauh ini, Malaysia menjadi mitra kerjasama e-WTP melalui Zona Perdagangan Bebas Digital (Digital Free Trade Zone, DFTZ) dengan 2.072 pebisnis Malaysia sebagai perintis platform (Siew Yean, 2018). Selain itu Alibaba juga bekerja sama dengan perusahaan perangkat lunak Aerospace Information Co. untuk meningkatkan teknologi komputasi awan (cloud computing) dan blockchain.

#### 3. Tencent

Tencent Holdings Limited, merupakan penyedia terkemuka layanan internet value-added di yang didirikan oleh Huateng Ma pada 1998. Bisnis utamanya adalah game online dan layanan pesan instan (WeChat) (Jia & Winseck, 2018). Dalam perkembanganya perusahaan ini melebarkan pengembangan pada bidang pusat data (data center) di lepas pantai. Saat ini pusat data luar negeri Tencent berada di Jerman, Hong Kong, Toronto, Singapura, dan Silicon Valley di AS. Pada 2018, Tencent bertujuan untuk berinvestasi dan membangun pusat data di negara mitra BRI hingga Rusia.

#### 4. Huawei

Huawei adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang didirikan pada 1987 oleh Ren Zhengfei. Huawei menjadi perusahaan telekomunikasi mitra China yang akan membantu pembangunan jalur serat optik sepanjang 4.800 km (Mori, 2019). Proyek ini membentang dari Kashgar di China barat ke Faizabad di Afganistan. Huawei juga dipercaya China sebagai vendor untuk membangun infrastruktur DSR baik itu di Asia, Eropa hingga Afrika (Eurasia Group, 2018). Platform transportasi layanan optik Huawei bertujuan untuk menghubungkan pusat data Eropa melalui koneksi kabel laut C-Lion dengan jaringan dan penyedia layanan di China dan mitra BRI lainnya. Selain menjadi pengembang kabel fiber optik, Huawei juga menjadi perusahaan penyedia jaringan 5G.

#### **5. ZTE**

Raksasa telekomunikasi ZTE didirikan oleh Hou Weigui pada 1985 di Shenzhen (ZTE Official Website, 2019). ZTE akan menjadi pengembang proyek *smart city* di negara mitra BRI dengan berfokus pada pembangunan sensor dan teknologi pengumpulan data. Tujuannya yakni untuk membantu pemerintah kota dalam meningkatkan manajemen perkotaan. Menurut Triolo dan Allison Huawei dan ZTE akan bergabung beberapa untuk mengembangkan kemampuan sensor internet dalam mendukung *China's Great Firewall* (Triolo & Allison, 2018). Pada 2017 Afiliasi ZTESoft meluncurkan upaya kolaboratif dengan Starhub Telecommunications ke Singapura mempromosikan "*Belt and Information Road*."

#### 3.4 Penutup

Kesimpulan pada bab ini adalah memahami alasan China untuk melakukan industrialisasi teknologi. China akan mengalokasikan investasi yang besar dan bekerjasama dengan perusahaan domestik yang bergerak dibidang digital untuk menguasai sektor digital internasional. Untuk mencapai ambisinya, China kemudian meluncurkan China's Digital Silk Road sebagai sub project dari BRI. Digital Silk Road ini dapat dikatakan sebagai payung dari rancangan kebijakan jangka panjang industrialisasi teknologi China. Lebih lanjut China kemudian membentuk aliansi dengan perusahaan Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei dan ZTE untuk merealisasikan proyek Digital Silk Road. Perusahaan ini bergerak sesuai dengan spesialisasinya misalnya Baidu dan Tencent berfokus pada pengembangan AI dan big data. Alibaba yang terus melebarkan pasar e-commerce-nya untuk menguasai pasar Eurasia serta Huawei dan ZTE yang memusatkan pada pengembangan jaringan telekomunikasi 5G dan kabel fiber optik. Dengan bekal landasan kebijakan digitalisasi yang kuat dari pemerintah pusat dan kerjasama dengan perusahaan digital yang kompeten maka di bab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai upaya implementasi dari proyek Digital Silk Road.

#### **BAB 5 KESIMPULAN**

Sebagai dampak dari cepatnya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri China, maka sektor industri juga mengalami peningkatan produksi yang tidak terkendali. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya kelebihan kapasitas produksi. Masalah ini adalah bagian yang tak dapat terelakkan dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Salah satu industri yang mengalami kelebihan kapasitas produksi di China adalah industri digital yang semakin meningkat sejak diluncurkannya jaringan telekomunikasi 5G dan kabel fiber optik bawah laut.

Untuk menindaklanjuti fenomena tersebut, pada tahun 2015 pemerintah China menerbitkan buku putih yang dinamakan *Digital Silk Road*. Proyek infrastruktur digital ini berupaya untuk meningkatkan konektivitas digital dengan menghubungkan daratan Asia, Eropa dan Afrika melalui pembangunan jaringan komunikasi, kabel bawah laut lintas benua dan peningkatan saluran satelit serta memperkuat transformasi digital industri seperti *AI, Cloud Computing*, dan *Big Data*. Rencana ekonomi makro ini dilengkapi dengan gambaran kebijakan yang konkret dan spesifik mengenai teknologi yang diproduksi, kebijakan khusus terkait pengelolaan hingga tabel waktu serta target implementasinya. Melalui DSR China tidak hanya berambisi untuk menjadi negara adidaya teknologi dan menguasai produksi teknologi digital semata, lebih luas China berusaha untuk mempromosikan *global connectivity* dan *digital ecosystem*.

Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, penulis menemukan bahwa ada keterlibatan aktor swasta dalam mendukung operasional proyek DSR. Hal ini dapat dilihat dari upaya Xi Jinping yang menjalin mitra strategis dengan perusahaan domestik China. Perusahaan ini diantaranya Baidu, Huawei, ZTE, Tencent dan Alibaba. Pembangunan infrastruktur ini memperlihatkan pemerintah China juga bekerja sama dengan pihak perusahaan. Mulai hal pembuatan kesepakatan investasi, pendanaan sementara hingga pada tahap realisasi pembangunan digital infrastruktur di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan yang telah ditunjuk oleh

pemerintah ini dipandang memiliki sumber daya yang berkualitas dan mumpuni sehingga dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

Kemudian dalam proses penyaluran modal dan investasi DSR di luar negeri, pemerintah China bekerjasama dengan *Export Import Bank* (Exim), *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB), *Silk Road Fund* (SRF) dan *New Development Bank* (NDB). Penunjukkan bank ini selaras dengan upaya China untuk menginternasionalisasi mata uang Renminbi dalam praktek pengimplementasian DSR. Sejak DSR diperkenalkan hingga tahun 2019 peneliti menemukan sudah ada 53 proyek yang tersebar di seluruh dunia dengan. Produk digital ini diantaranya jaringan komunikasi 5G, jaringan kabel serat optik, platform perdagangan digital (*e-commerce*) dan pembangunan kota pintar atau (*smart city*).

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa proyek DSR menjadi sarana China untuk menjadi negara adidaya teknologi dengan memanfaatkan segala sumber daya, kapabilitas, pendanaan dan sinergi dari *state* maupun *non-state* aktor. Kolaborasi dari semua elemen yang terlibat dalam DSR menunjukkan bahwa, China dapat memproduksi sendiri semua infrastruktur digital, layanan jaringan, *high-end software* dan platform *e-commerce* yang sesuai dengan standar China. Hal ini dimaksudkan agar China dapat memperluas pasar produksinya dan tidak lagi menggantungkan teknologi kepada negara/pihak lain.

Dampak dari proyek DSR ini adalah China telah mampu menguasai arus data dan teknologi terkhusus di kawasan Asia Pasifik dan secara global. Hal ini diperkuat dengan kemampuan China untuk mengamankan tiga posisi kunci di badan pengaturan standar teknologi internasional, menciptakan infrastruktur konektivitas digital yang berpusat di China serta membentuk tata kelola dan norma dunia maya yang baru. Penguasaan data ini akan meningkatkan pengaruh China di tatanan internasional dan menciptakan ketergantungan bagi negara berkembang untuk menggunakan teknologi China.

Penggunaan konsep *structural power* dalam penelitian ini dapat menjelaskan secara komprehensif dari proses implemplementasi DSR. Hal ini dapat terlihat bahwa masing-masing aktor memiliki potensi dan perannya sendiri. Seperti yang

telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, pemetaan potensi kekuatan ini merupakan langkah dasar dalam menganalisis *structural power*. Kondisi yang dimaksud adalah dimulai dari potensi internal seperti seberapa besar sumber daya yang tersedia dan seberapa potensial sumber daya tersebut untuk dapat menjadi modal yang dibutuhkan oleh aktor lain. Apabila pondasi sudah dibangun, pemetaan modal baik dari segi jenisnya maupun ketersediaannya, kemudian dilanjutkan ke tahap pengimplementasian. Dari sinilah kemudian pemerintah China, Bank dan perusahaan domestik China saling berinteraksi untuk memberikan pengaruhnya satu sama lain, khususnya dalam hal pengimplementasianya. Ketika semua aktor ini berhasil berkolaborasi dalam hal implementasi maupun operasionalnya, maka dapat dikatakan bahwa China telah memegang kendali *structural power*. Dengan demikian China telah memiliki pengaruh (*leverage*) dan ketergantungan (*dependency*) yang lebih di sektor digital internasional.

Dengan menggunakan teori ekonomi politik internasional, penulis dapat menujukkan bahwa DSR menjadi manifestasi nyata dari gagasan kebangkitan China untuk melegitimasi langkahnya dalam menguasai teknologi digital dunia dan menggeser hegemoni Amerika Serikat. DSR menjadi senjata ekonomi yang digunakan oleh China untuk memanfaatkan potensi domestik dan alat politik luar negeri China untuk memperkuat dominasinya di tingkat internasional dengan membentuk standar dan norma global yang baru.

Di tangan Xi Jinping, China berhasil memegang kendali structural power dengan potensi yang sangat kuat. Dengan penguasaan teknologi digital, kepemilikan modal yang besar dan akses pasar yang terbuka lebar menjadikan China mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi interaksi dengan negara berkembang. Negara berkembang ini sangat membutuhkan investasi dibidang teknologi untuk mengurangi gap globalisasi. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menujukkan bahwa konsep *structural power* dan teori ekonomi politik internasional yang digunakan dalam penelitian implementasi *Digital Silk Road* China sangat sesuai untuk menjabarkan dan menganalisis rumusan masalah yang diangkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Ani, S. (2018). Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional. Yayasan Obor Indonesia.
- Cipto, B. (2018). Strategi China Merebut Status Super Power.
- Kaufman, J. P. (2013). *Introduction to International Relations: Theory and Practice*. Retrieved from www.rowman.com
- Masoed, M. (1994). *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Muas, T. N. (2008). Reformasi Gradual yang Penuh Penyesuaian. In *30 Titik Balik Historiografi di Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Strange, S. (1984). *Paths to International Political Economy*. London: George Allen & Unwin.
- Strange, S. (1986). Casino Capitalism. In Basil Blackwell Ltd., Oxford.
- Strange, S. (1988). *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*. London: Bloomsbury Publishing.
- Strange, S. (1996). The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge University Press.
- Taniputera, I. (2011). History of China. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wibowo, P. (2007). Perubahan Sosial Cina Tahap Pertama: Mao dan Pedesaan (1949-1959). In *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI Depok*.
- Widyahartono, B. (2004). *Bangkitnya Naga Besar Asia : Peta Politik, Ekonomi dan Sosial China Menuju China Baru*. Yogyakarta: Andi.

#### Website institusi/lembaga/organisasi

- CEIC Data Co. Ltd. (2020, April 7). China Foreign Direct Investment. Retrieved April 7, 2020, from CEIC Data Co. Ltd website: https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/foreign-direct-investment
- China Development Bank. (2015). Retrieved July 16, 2020, from China Development Bank website: http://www.cdb.com.cn/English/gykh\_512/khjj/
- China Power. (2018). Does China Dominate Global Investment? Retrieved November 27, 2020, from CSIS website: https://chinapower.csis.org/chinaforeign-direct-investment/
- National Development and Reform Comission; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Commerce of the People's Republic of China; State Council. (2015). Vision and actions on jointly building Silk Road economic belt and 21st-century maritime Silk Road. Retrieved March 28, 2020, from NDRC Governmentwebsite:http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\_6 69367.html
- State Council. (2016). 国务院关于印发"十三五"国家信息化规划的通知(国发〔2016〕73号)\_政府信息公开专栏. Retrieved November 12, 2020, from State Council website: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/27/content\_5153411.htm
- World Bank. (2020a). GDP growth (annual %) China Hu Jintao. Retrieved March 25, 2020, from World Bank website: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?contextual=de fault&end=2013&locations=CN&start=2002
- World Bank. (2020b). GDP per capita growth (annual %) United States, China. Retrieved February 3, 2020, from World Bank website: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=US-CN
- Worldometer. (2020). Population by Country. Retrieved March 24, 2020, from

- https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
- Xinhua News Agency. (2020). China issues plan for digital agricultural, rural development.
- ZTE Official Website. (2019). Introduction About ZTE . Retrieved November 21, 2020, from ZTE Official Website website: https://www.zte.com.cn/global/about/corporate\_information/Introduction

#### Laporan

- AIIB. (2006). White Paper on China's Peaceful Development Road. *China Report*, 42(2). https://doi.org/10.1177/000944550604200208
- AIIB. (2015). Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement.
- Deloitte. (2019). *BRI update 2019–recalibration and new opportunities*. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/ser-soe-br/deloitte-cn-bri-update-2019-recalibration-and-new-opportunities-en-190422.pdf
- Hornby, L. (2017). China's Domestic Information Controls, Global Media Influence, And Cyber Diplomacy. In *Controls, Global Media Influence, and Cyber Warfare Strategy* (pp. 452–454). Retrieved from https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-10/Chapter 3, Section 5 China's Domestic Information Controls, Global Media Influence, and Cyber Diplomacy\_0\_0.pdf
- Kliman, D., Doshi, R., Lee, K., & Cooper, Z. (2019). *Grading China's Belt and Road*. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/CNAS+Report\_China+Belt+and+Road\_final.pdf
- KPMG China. (2017). Overview of China's Cybersecurity. *Kpmg*, (February), 16.
  Retrieved from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2017/02/overview-of-cybersecurity-law.pdf

- Lele, A., & Roy, K. (2019). Analysing China's Digital And Space Belt And Road Initiative. New Delhi.
- Longmei, Z. and, & Sally, C. (2019). *China's Digital Economy: Opportunities and Risks*.
- Miranville, A. (2019). Annual Report 2018. *AIMS Mathematics*, *4*(1), 19. https://doi.org/10.3934/Math.2019.1.166
- Mochinaga, D. (2020). The Expansion of China's Digital Silk Road and Japan's Response. *Asia Policy*, 27(1), 41–60. https://doi.org/10.1353/asp.2020.0005
- Mori, S. (2019). US Technological Competition with China: The Military, Industrial and Digital Network Dimensions. *Asia-Pacific Review*, 26(1), 77–120. https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1622871
- OECD. (2018). The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape. 61–101. https://doi.org/10.1787/bus\_fin\_out-2018-6-en
- Wübbeke, J., Meissner, M., Zenglein, M. J., Ives, J., & Conrad, B. (2016). Made in China 2025 The making of a high-tech superpower. *MERICS Papers on China*.

#### Jurnal

- Anam, S., & Ristiyani. (2018). *Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*. (1). Retrieved from https://www.google.com/search?q=journal+perekonomian+cina&oq=journal+perekonomian+cina&aqs=chrome..69i57j0.11735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Arsht, A., Avendano, R., Melguizo, A., & Miner, S. (2017). *Chinese FDI in Latin America: New Trends With Global Implications*.
- Campell, J. R. (2013). Becoming a Techno-Industrial Power: Chinese Science and Technology Policy. *Brookings Issues in Technology Innovation*, 23(4), 1–15. Retrieved from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/29-

- science-technology-policy-chinacampbell.pdf%0Ahttps:// www.brookings.ed u/wpcontent/uploads/2016/06/29-science-technology-policychinacampbe ll.pdf% 0Ahttps://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016
- Chaisse, J., & Górski, J. (2018). *The belt and road initiative : law, economics, and politics.* BRILL.
- Chaisse, J., & Matsushita, M. (2018). China's 'belt and road' initiative: Mapping the world trade normative and strategic implications. *Journal of World Trade*, 52(2), 163–185.
- Cheney, C. (2019). China 's Digital Silk Road: Strategic Technological Competition and Exporting Political Illiberalism Challenges for the US (Vol. 19).
- Collinson, S. (2003). Power, Livelihoods and Conflict: Case Studies in Political Economy Analysis for Humanitarian Action. Retrieved from www.odi.org.uk/hpg
- Culpepper, P. D. (2015). Structural power and political science in the post-crisis era. *Bus. Polit*, *17*(3), 391–409. https://doi.org/10.1515/bap-2015-0031
- Dallas, & Washington. (2019). The Digital Silk Road Initiative: Wiring Global IT and Telecommunications to Advance Beijing's Global Ambitions Pointe Bello is a strategic intelligence and advisory firm with offices in.
- Davies, K. (2013). *China Investment Policy: An Update*. https://doi.org/10.1787/5k469l1hmvbt-en
- Ensafi, R., Winter, P., Mueen, A., & Crandall, J. R. (2015). Analyzing the Great Firewall of China Over Space and Time. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*. https://doi.org/10.1515/popets-2015-0005
- Fischer, S. (2018). China and AI (refazer título). *CSS Analyses in Security Policy*, (February), 1–4. Retrieved from https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse220-EN.pdf
- Gennari, L. (2017). Power Transitions and International Institutions: China's

- Creation of the Asian Infrastructure Investment Bank. *Power*, 4, 21.
- González, A., & GAO, H. (2016). E-Commerce in China Opportunities for Asian Firms. *Industrial Marketing Management*, *31*(2), 1–30. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850101001833%0Aht tp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0019850101001833
- Hammood, H. A. (2011). International Political Economy: Perspectives, Structures & Global Problems. *Iraqi Journal for Economic Sciences*, 187–220.
- Hong, Y. (2017). Reading the 13th Five-Year Plan: Reflections on China's ICT policy. International Journal of Communication, 11, 1755–1774.
- Jia, L., & Winseck, D. (2018). The political economy of Chinese internet companies: Financialization, concentration, and capitalization. *International Communication Gazette*, 80(1), 30–59. https://doi.org/10.1177/1748048517742783
- Kaplan, S. B. (2016). Banking unconditionally: the political economy of Chinese finance in Latin America. *Review of International Political Economy*, 23(4), 643–676. https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1216005
- Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? *Politica*, 7(2), 233–254.
- Lampton, D. M. (2013). A New Type of Major-Power Relationship: Seeking a Durable Foundation for U.S.-China Ties. *Asia Policy*, 51–68. https://doi.org/10.2307/24905231
- Laurenceson, J., Van Nieuwenhuizen, S., & Collinson, E. (2017). *Australia's engagement with China's Belt and Road Initiative*.
- Lee, S. (2017, February 6). The Cybersecurity Implications of Chinese Undersea Cable Investment . Retrieved November 2, 2020, from East Asia Center University of Washington website: https://jsis.washington.edu/eacenter/2017/02/06/cybersecurity-implications-chinese-undersea-cable-investment/

- Pieterse, J. N. (2015). *Third World Quarterly China's contingencies and globalisation*. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1067860
- Ren, P., Zhang, L., Zhu, R., & Zhang, J. (2017). *How China's Policy Banks Can Support Sustainable Foreign Investment*. (August), 61.
- Reuters. (2017, November 1). Springer Nature blocks access to certain articles in China. Retrieved November 2, 2020, from Reuters website: https://www.reuters.com/article/us-china-censorship-idUSKBN1D14EB
- Shen, H. (2018). Building a Digital Silk Road? Situating the Internet in China's Belt and Road Initiative. *International Journal of Communication*, 12, 19.
- Shi-Kupfer, K., & Mareike, O. (2019). CHINA'S DIGITAL RISE Challenges for Europe.
- Shi-Kupfer, K., & Ohlberg, M. (2019, April 8). China's Digital Rise. Retrieved November 2, 2020, from Merics website: https://merics.org/en/report/chinas-digital-rise
- Siew Yean, T. (2018). SMEs onto the Digital Silk Road. *ISEAS Yusof Ishak Institute*.
- Stanzel, A., Rolland, N., Jacob, J., & Hart For European, M. (2017). *Center for Security Studies Grand Designs: Does China Have a "Grand Strategy"?*Retrieved from https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/e6468897-903a-4cb5-a28c-e4a911fa7d2e/pdf
- Sun, Y. (2018). *The Reasons Why China's OBOR Initiative Goes Digital*. (May). https://doi.org/10.1515/9783110440539-toc
- Wang, Z., Chen, C., Guo, B., Yu, Z., & Zhou, X. (2016). Internet Plus in China. *IT Professional*. https://doi.org/10.1109/MITP.2016.47
- Wu, F., Lu, C., Zhu, M., Chen, H., Zhu, J., Yu, K., ... Pan, Y. (2020). Towards a new generation of artificial intelligence in China. *Nature Machine Intelligence*. https://doi.org/10.1038/s42256-020-0183-4
- Willy Lam. (2016). Chinese Politics in the Hu Jintao Era: New Leaders, New

- Challenges. In *Routledge*. Retrieved from https://books.google.dm/books?id=rXeTDAAAQBAJ
- Yu, X., Rizzi, C., Tettamanti, M., Fabio, Z., & Guo, L. (2018). *China's Belt and Road: The Initiative and Its Financial Focus* (Vol. 2). Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zhVeDwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PR5&ots=mSetHLhdvb&sig=rj9aY3sbkD331FDOltUGDOzn6mI
- Zhang, L., & Chen, S. (2019). China's digital economy: Opportunities and risks. *International Organisations Research Journal*, 14(2), 275–303. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-02-11
- Zhang, Z. (2020, August 6). China's Incentives for Integrated Circuit, Software Enterprises. Retrieved November 2, 2020, from China Briefing website: https://www.china-briefing.com/news/china-integrated-circuit-software-enterprises-tax-incentives/
- Zhao, H. (2019). Energy Diplomacy. In *The Economics and Politics of China's Energy Security Transition* (pp. 121–149). https://doi.org/10.1016/b978-0-12-815152-5.00006-3
- Zhou Enlai Peace Institute. (1953). Five Principles of Peace. Retrieved July 17, 2020, from Zhou Enlai Peace Institute website: http://www.zhouenlaipeaceinstitute.org/five-principles-of-peace-2/

#### Skripsi

Darini, R. (2010). GARIS BESAR SEJARAH CHINA ERA MAO.

#### **Artikel internet**

- AFD China. (2020). China Issues Action Plan for Big Data Development-IP News. Retrieved November 20, 2020, from AFD China website: http://afdip.com/html/japan/index.php?ac=article&at=read&did=2521
- BBC NEWS. (2012, November 15). Full text: China's new party chief Xi Jinping's

- speech. *BBC*. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-china-20338586
- Carr, E. (2020, June 20). Is China Threatening America's Dominance In The Digital Space? Retrieved September 22, 2020, from Forbes website: https://www.forbes.com/sites/earlcarr/2020/06/20/is-china-threatening-americas-dominance-in-the-digital-space/#34fa26fe3cd4
- CGTN. (2019, September 15). Why can China lead in 5G and AI sectors? Retrieved November 2, 2020, from CGTN website: https://news.cgtn.com/news/2019-09-15/Why-can-China-lead-in-5G-and-AI-sectors--K0DlmoRiAE/index.html
- Chipman, J. (2019). China's long and winding Digital Silk Road. Retrieved from IISS website: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/01/china-digital-silk-road
- CNBC. (2019, May 23). CNBC Transcript: United States Secretary of State Mike Pompeo Speaks with CNBC's "Squawk Box" Today. Retrieved September 22, 2020, from CNBC website: https://www.cnbc.com/2019/05/23/cnbc-transcript-united-states-secretary-of-state-mike-pompeo-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html
- CNN. (2019, March 5). Anggaran Pertahanan China Naik Jadi Rp2.500 Triliun. 

  CNN Indonesia. Retrieved from 
  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190305101445-113374564/anggaran-pertahanan-china-naik-jadi-rp2500-triliun
- Creemers, R., Tiolo, P., & Webster, G. (2018, April 30). Xi Jinping's April 20 Speech at the National Cybersecurity and Informatization Work Conference. Retrieved November 2, 2020, from New America website: https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-xi-jinpings-april-20-speech-national-cybersecurity-and-informatization-work-conference/
- Creemers, R., Triolo, P., Sacks, S., Lu, X., & Webster, G. (2018, March 26). China's Cyberspace Authorities Set to Gain Clout in Reorganization.

- Retrieved November 2, 2020, from New America website: https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/chinas-cyberspace-authorities-set-gain-clout-reorganization/
- CSIS. (2020, August 25). Is China a Global Leader in Research and Development?

  Retrieved November 2, 2020, from CSIS website: https://chinapower.csis.org/china-research-and-development-rnd/
- Dace, H. (2020, January 9). China's Tech Landscape: A Primer. Retrieved April 15, 2020, from Tony Blair Institute for Global Change website: https://institute.global/policy/chinas-tech-landscape-primer
- David, S. (2018). China spends \$279 bln on R&D in 2017: science minister.

  Retrieved September 21, 2020, from Reuters website:

  https://www.reuters.com/article/us-china-economy-r-d-idUSKCN1GB018
- Deeks, R. (2018, December 8). The Digital Silk Road China's \$200 billion project . Retrieved November 11, 2020, from BBC Science Focus Magazine website: https://www.sciencefocus.com/future-technology/the-digital-silk-road-chinas-200-billion-project/
- Devex. (2000). Export-Import Bank of China (China Eximbank). Retrieved July 16, 2020, from Devex website: https://www.devex.com/organizations/export-import-bank-of-china-china-eximbank-52315
- Diamandis, P. H. (2018a, August 17). Baidu, Alibaba, and Tencent: The Rise of China's Tech Giants. Retrieved November 21, 2020, from Singularity Hub website: https://singularityhub.com/2018/08/17/baidu-alibaba-and-tencent-the-rise-of-chinas-tech-giants/
- Diamandis, P. H. (2018b, August 29). China is Quickly Becoming an AI Superpower. SingularityHub. Retrieved from https://singularityhub.com/2018/08/29/ china-ai-superpower/#sm.0000vx96wm5h5duvye42h74g8kc46
- Dongguan Hongrong Electrical Machinery Co, L. (2019, February 14). Analisis Industri Kabel Serat Optik China Pada Tahun 2019 Berita. Retrieved April

- 25, 2020, from http://id.hongrong-ofcmachine.com/news/7777665444-21236463.html
- Eurasia Group. (2018). China's Digital Silk Road to gain traction in 2018.
- Eurasia Group. (2020). *The Digital Silk Road: Expanding China's Digital Footprint*. (April), 1–13.
- Feng, E., & Cheng, A. (2019, October 24). China's Tech Giant Huawei Spans Much Of The Globe Despite U.S. Efforts To Ban It . Retrieved November 2, 2020, from NPR website: https://www.npr.org/2019/10/24/759902041/chinas-techgiant-huawei-spans-much-of-the-globe-despite-u-s-efforts-to-ban-it
- Fiber Pro. (2020, January 3). What we know so far about China's digital silk route.

  Retrieved April 15, 2020, from Viavi Perspective website: https://blog.viavisolutions.com/2020/01/03/3589/
- Focus Economic. (2020, August 20). China Economy GDP, Inflation, CPI and Interest Rate. Retrieved November 2, 2020, from Focus Economic website: https://www.focus-economics.com/countries/china
- Freedom House. (2019). Countries and Territories | Freedom House. Retrieved April 24, 2020, from https://freedomhouse.org/countries/freedomworld/scores
- Green, K. (2019, December 2). Securing the Digital Silk Road. Retrieved September 23, 2020, from Center for Advanced China Research website: https://www.ccpwatch.org/single-post/2019/02/11/Securing-the-Digital-Silk-Road
- Guest Blogger. (2017, June 6). Beijing's Silk Road Goes Digital. *Council on Foreign Relations*. Retrieved from https://www.cfr.org/blog/beijings-silk-road-goes-digital
- Guoxin Security Institute Chen Yuehua Cui Yuhua. (2017). Leveraging on "One Belt One Road" to speed up my country's cyber security companies going global.

- Hao, C. J. (2019a). All may not be smooth along China's Digital Silk Road. Retrieved March 19, 2020, from Lowy Institute website: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/all-may-not-be-smooth-along-china-s-digital-silk-road
- Hao, C. J. (2019b, April 30). China's Digital Silk Road: A Game Changer for Asian Economies. The Diplomat. Retrieved from https://thediplomat.com/2019/04/chinas-digital-silk-road-a-game-changer-for-asian-economies/
- Hodiak, J. and H. S. W. (2020, September 25). Can China Become the World Leader in Semiconductors? Retrieved November 2, 2020, from The Diplomat website: https://thediplomat.com/2020/09/can-china-become-the-world-leader-in-semiconductors/
- Hui, L. (2016). China's Outbound Direct Investment Surges.
- Kelkar, K. (2018, August 18). China is building a new Silk Road and this one's digital | World Economic Forum. Retrieved November 20, 2020, from World Economic Forum website: https://www.weforum.org/agenda/2018/08/china-is-building-a-new-silk-road-and-this-one-s-digital/
- Kharpal, A. (2018, August 7). China has outspent the U.S. by \$24 billion in 5G technology since 2015. Retrieved September 23, 2020, from CNBC website: https://www.cnbc.com/2018/08/07/china-outspent-us-by-24-billion-in-5g-technology-since-2015.html
- Kharpal, A. (2019). Huawei: US will lag in 5G if it is blocked after Trump executive order. Retrieved September 22, 2020, from CNBC website: https://www.cnbc.com/2019/05/16/huawei-us-5g-block-after-trump-executive-order.html
- Kidera, M. (2020, August 15). Huawei's deep roots put Africa beyond reach of US crackdown . Retrieved November 2, 2020, from Nikkei Asia website: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-s-deep-roots-put-Africa-beyond-reach-of-US-crackdown

- Kitson, A. K. L. (2019, November 14). China Doubles Down on Its Digital Silk Road. Retrieved April 16, 2020, from Reconnecting Asia website: https://reconnectingasia.csis.org/analysis/entries/china-doubles-down-its-digital-silk-road/
- KOMPAS. (2019, December 23). China Terapkan Aturan Sensor Internet Baru. Retrieved April 24, 2020, from https://tekno.kompas.com/read/2019/12/23/20010077/china-terapkan-aturan-sensor-internet-baru
- Kuhn, R. L. (2013, June 4). Xi Jinping's Chinese Dream. Retrieved March 25, 2020, from The New York Times website: https://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html
- Laihui, X. (2020). BRI aims for high-quality development. *China Daily*. Retrieved from https://www.chinadaily.com.cn/a/202001/22/WS5e2790f6a310128 2172729f4.html
- Leng, C. (2019, April 18). China's EximBank provides more than \$149 bln for Belt and Road projects Reuters. Retrieved July 16, 2020, from Reuters website: https://www.reuters.com/article/china-bank-beltandroad/chinas-eximbank-provides-more-than-149-bln-for-belt-and-road-projects-idUSL3N2202TI
- Population Pyramid. (2019). Population of China 2019. In *Population Pyramid*. Retrieved from https://www.populationpyramid.net/china/2019/
- Prasso, S. (2019, January 10). China's Digital Silk Road Is Looking More Like an Iron Curtain. Retrieved November 11, 2020, from Bloomberg website: https://www.bloomberg.com/news/features/2019-01-10/china-s-digital-silk-road-is-looking-more-like-an-iron-curtain
- Riccio, K. (2017, June 14). Alibaba Cloud to Launch Data Centers in India, Indonesia | Data Center Knowledge. Retrieved November 2, 2020, from Data Center Knowledge website: https://www.datacenterknowledge.com/archives/2017/06/14/alibaba-cloud-

- to-launch-data-centers-in-india-indonesia
- Sebayang, R. (2019, December 25). Ini Cara China Maju, Jadi Ekonomi Terbesar ke-2 Dunia. Retrieved November 2, 2020, from CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225094237-4-125509/ini-carachina-maju-jadi-ekonomi-terbesar-ke-2-dunia
- Setzekorn, E. (2009). In Case You Missed It: Capitalism with Chinese Characteristics. *The China Beat Blog Archive* 2008-2012. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/chinabeatarchive/451
- Silver, C. (2020). The Top 20 Economies in the World. Retrieved February 3, 2020, from investopedia website: https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/
- Summer, W.;, & Tripti, L. (2019, April). A future AI park in Malaysia shows how criticism is changing China's foreign investment. *Quartz*. Retrieved from https://w0A/qz.com/1602194/an-ai-park-in-malaysia-shows-chinas-belt-and-road-isevolving/
- The Economist. (2020). *The digital Silk Road The digital side of the Belt and Road Initiative is growing*. Retrieved from https://www.economist.com/special-report/2020/02/06/the-digital-side-of-the-belt-and-road-initiative-is-growing
- Tomas, J. P. (2016, October 2). Yinchuan leads the way in smart city initiatives. Retrieved November 2, 2020, from Enterprise IoT Insights website: https://enterpriseiotinsights.com/20160902/channels/fundamentals/yinchuan-smart-city-tag23-tag99
- Translated by New America. (2017). A Next Generation Artificial Intelligence Development Plan: China. *New America*.
- Triolo, P., & Allison, K. (2018, November 15). Eurasia Group | The Geopolitics of 5G. Retrieved November 2, 2020, from Eurasia Group website: https://www.eurasiagroup.net/live-post/the-geopolitics-of-5g
- Tucker, P. (2017, November 1). China Will Surpass US in AI Around 2025, Says

- Google's Eric Schmidt . Retrieved November 2, 2020, from Defense One website: https://www.defenseone.com/technology/2017/11/google-chief-china-will-surpass-us-ai-around-2025/142214/
- Wagner, J. (2017, June 1). China's Cybersecurity Law: What You Need to Know. Retrieved October 27, 2020, from The Diplomat website: https://thediplomat.com/2017/06/chinas-cybersecurity-law-what-you-need-to-know/
- Wedell, L. (2020, July 27). CHINA IS GIVING ANCIENT SILK ROAD TRADE ROUTES A DIGITAL MAKEOVER. *Global Trade Magazine*. Retrieved from https://www.globaltrademag.com/china-is-giving-ancient-silk-road-trade-routes-a-digital-makeover/
- Yang, L. (2019). Funding the new Silk Road Central Banking. Retrieved July 16, 2020, from Central Banking website: https://www.centralbanking.com/central-banks/economics/4129821/funding-the-new-silk-road
- Zaenudin, A. (2020, January 15). Mimpi Basah China Membangun Infrastruktur Digital Dunia. Retrieved April 15, 2020, from Tirto.id website: https://tirto.id/mimpi-basah-china-membangun-infrastruktur-digital-dunia-eqoo
- Zhou, L., & Denise Leung. (2015, January 28). China"s Overseas Investments, Explained in 10 Graphics. *World Resources Institute*. Retrieved from https://www.wri.org/blog/2015/01/china-s-overseas-investments-explained-10-graphics

#### LAMPIRAN

Tabel Kebijakan Pemerintah Pusat China Mengenai Digitalisasi

Nama Kebijakan	Tanggal Pembuatan Kebijakan	Institusi yang bertanggung jawab	Outline
Social Credit System Construction Plan (2014-2020)	14-06-2014	Dewan Negara	Menetapkan undang-undang dasar dan standar mengenai kredit sosial pada tahun 2020
Made in China 2025	19-05-2015	Dewan Negara	Inisiatif untuk mengangkat korporasi domestik ke tingkat global
Big Data Development Action Plan	31-08-2015	Dewan Negara	Mempromosikan penggunaan <i>big</i> data di sektor industri dan pertanian
Internet Plus Action Plan Development Plan	14-12-2015	Kementerian Industri dan Teknologi Informasi	Mempercepat integrasi antara industrialisasi dan informatisasi
13th Five-Year Plan National Informatization	titional 27-12-2016 Dewan Negara		Kebijakan ini erat kaitanya dengan kebijakan seperti Big Data, Internet Plus, Entrepreneurship Policy, dan Made in China 2025
New Generation Artificial Intelligence Development Plan	nce 08-07-2017 Dewan Negara		Mengupayakan pengembangan AI secara optimal, China berambisi menjadi perintis sekaligus pemain utama di industri AI
Connected Car Industry Development Plan	27-12-2018	Kementerian Industri dan Teknologi Informasi	Merumuskan standar industri dan membuat database untuk mendapatkan level 3 dalam autonomous driving

#### Tabel Implementasi Proyek Digital Silk Road

	Nama Proyek / Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Estimasi Proyek	Status	Tipe Proyek	Tahun	Pengembang
1	Malaysia Digital Free Trade Zone (Dftz)	Malaysia	USD 34.9 juta	Sedang Dibangu n	E- Commerce	Maret 2017	Alibaba Group
2	Globebill-Ecard S. A. Collaboration Project	Polandia	-	Selesai	E- Commerce	2014	GlobeBill
3	Lazada	Singapore	USD 2000	Selesai	E- Commerce	Maret 2018	Alibaba
4	Tokopedia	Indonesia	USD 2200	Selesai	E- Commerce	I : Agustus 2017 II : Desember 2018	Alibaba, Softbank Vision Fund
5	Lazada	Singapore	USD 1000	Selesai	E- Commerce	Juni 2017	Alibaba
6	Voyager Innovations	Filipina	USD 215	Selesai	Fintech	November 2018	Tencent, International Finance Corporation
7	Bukalapak	Indonesia	USD 50	Selesai	E-Commerce	Januari 2019	GIC, Antfinancial, Mirae Asset- Naver Asia Growth Fund, Emtek Group
8	Cameroon-Brazil Cable System (Sail)	Kribi, Kamerun, Fortaleza, Brasil	USD 525.5 juta	Selesai	Kabel Serat Optik	September 2018	Huawei Marine/ China Unicom
9	Hyalroute- Cambodia Submarine Cable	Sihanoukville, Kamboja	USD 70 juta	Selesai	Kabel Serat Optik		HyalRoute/ Cambodia Fibre Optic Communication Network (CFOCN)
10	Asia-Pacific Gateway (Apg) Submarine Fiber Optic Cable 10.900 km	China/Vietnam Malaysia/ Jepang/ Korea Selatan/ Thailand/ Singapura/ Taiwan/ Hong Kong		Selesai	Kabel Serat Optik		China Telecom China Unicom China Mobile
11	Rawalpindi- Khunjerab Fiber Optic Cable	Rawalpindi, Pakistan	USD 44 juta	Selesai	Kabel Serat Optik	Juli 2018	Huawei Technologies

	Nama Proyek / Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Estimasi Proyek	Status	Tipe Proyek	Tahun	Pengembang
12	Asia Africa Europe-1 (Aae-1) Submarine Cable 25.000 KM	Mesir/Yaman/ Oman/Italia/ HongKong/ Yunani/Djibouti/ Qatar/UAE/ Saudi Arabia/Pakistan/ Malaysia/Prancis/ India/Myanmar/ Thailand/ Kamboja/Vietnam	R	Selesai	Kabel Serat Optik	2017	HyalRoute China Unicom
13	Burkina Faso Fiber Optic Cable System	Ouagadougou, Burkina Faso	USD 20.5 juta	Selesai	Kabel Serat Optik	July 2018	Huawei Technologies
14	China- Afghanistan Fiber Optic Network	Afghanistan/ China	USD 60 juta	Sedang Dibang un	Kabel Serat Optik	April 2017	Zhongxing Technologies (ZTE)/Huawei Technology
15	Kumul Submarine Cable	Papua Nugini	USD 200 juta	Sedang Dibang un	Kabel Serat Optik	Agustus 2018	Huawei Marine
16	Kenya National Optic Fibre Backbone (Nofbi)	Nairobi, Kenya	USD 59.3 juta	Sedang Di bangun	Kabel Serat Optik	Tahap I 2012 Tahap II 2014	Huawei Technologies
17	Myanmar Fiber Optic Communication Network	Myanmar	USD 118.6 juta	Selesai	Kabel Serat Optik	April 2012	HyalRoute/My anmar Fiber Optic Communication Network (MFOCN)
18	Nationwide Submarine Cable Ooredoo Maldives (Nascom) 1.200 km	Maldives	USD 25 juta	Selesai	Kabel Serat Optik	Desember 2016	Huawei Marine
19	Strategic Evolution Underwater Link (Seul)	Belize	USD 100 juta	Selesai	Kabel Serat Optik	Agustus 2017	Huawei Marine
20	Mauritius And Rodrigues Submarine Cable System (Mars)	Mauritius	-	Sedang Di bangun	Kabel Serat Optik	2017	Huawei Marine

	Nama Proyek / Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Estimasi Proyek	Status	Tipe Proyek	Tahun	Pengembang
21	Southeast Asia-Japan Cable 2 (Sjc2) 10.500 KM	Singapura, Jepang,HongKon g,Taiwan China,Korea Selatan,Vietnam, Kamboja ,Thailand		Sedang Dibangun	Kabel Serat Optik	Selesei 2020	China Mobile
22	Bay To Bay Express Cable System (Btobe)	Amerika Serikat/ Singapura/ Malaysia/ Hong Kong		Sedang Dibangun	Kabel Serat Optik	Dimulai 2021	China Mobile
23	Peace Submarine Cable	Pakistan/Mesir/P rancis/Djibouti/S omalia/Kenya/ Afrika Selatan/ Seychelles	1	Sedang Dibangun	Kabel Serat Optik	November 2017	Huawei Ocean Network Company/ China-ASEAN Information Harbor Company/China Construction Bank
24	Eutelsat- China Unicom Joint Venture	Paris, Prancis		Di umumkan	Infrastruktur Satelit	Januari 2018	China Unicom
25	China- Pakistan Beidou Navigation System	Karachi, Pakistan	W	Sedang Dibangun	Infrastruktur Satelit	2018	China Great Wall IndustryCo./ Beijing Unistrong Science And Technology Co.
26	Patagonia Telemetry Tracking And Command Station	Patagonia, Argentina	USD 300 Juta	Selesai	Infrastruktur Satelit	2018	China Harbour
27	Forest City	Johor Bahru, Malaysia	USD 100 Milyar	Sedang Dibangun	Smart City	2016	Huawei Technologies/ China Construction/ Steel Structure Corporation
28	New Manila Bay-City Of Pearl	Manila, Filipina	USD 100 Milyar	Sedang Dibangun	Smart City	Agustus 2017	Uaa Kinming Group Development Corporation

	Nama Proyek / Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Estimasi Proyek	Status	Tipe Proyek	Tahun	Pengembang
29	Duisburg Smart City	Duisburg, Jerman		Sedang Dibangun	Smart City	Januari 2018	Huawei Technologies
30	Lahore Safe City	Punjab, Pakistan	-	Selesai	Smart City	2015	Huawei Technologies
31	Mauritius Smart City	Mauritius		Sedang Dibangun	Smart City	2019	Huawei Technologies
32	Belgrade Safe City Phase 1	Belgrade, Serbia	) U- \	Selesai	Smart City	Selesai 2019	Huawei Technologies
33	Queretaro Ict Facilities	Queretaro, Mexico	USD 1.5 Milyar	Selesai	Smart City	Oktober 2014 selesai Desember 2015	Huawei Technologies
34	Urban Safety Command And Control Center (Ecu 911)	Quito, Ecuador	USD 42.69 juta	Selesai	Smart City	Tahap II selesai pada tahun 2014	China National Electronics Import and Export Corporation
35	Rivas- Vaciamadrid Smart City	Rivas- Vaciamadrid, Spanyol	-/	Selesai	Smart City	Sejak 2012	Huawei Technologies
36	Bonifacio Global City (Bgc)	Manila, Filipina	<u>.</u>	Selesai	Smart City	2014	Huawei Technologies
37	City Of Ekurhuleni (Coe)	Gauteng, Afrika Selatan	-	Selesai	Smart City	2016	Huawei Technologies
38	Smart Zambia	Lusaka, Zambia	V7 (	Selesai	Smart City	Selesai 2016	Huawei Technologies
39	Venezuelan Smart Id Database	Venezuela	USD 70 juta	Selesai	Smart City	Huawei	Zhongxing Technologies (ZTE)
40	Gelsen-Net Smart City	Gelsenkirchen, Jerman	-	Selesai	Smart City	2017	Huawei Technologies

	Nama Proyek / Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Estimasi Proyek	Status	Tipe Proyek	Tahun	Pengembang
41	Oman Digital Infrastructure Project	Oman	USD 239 juta	Sedang Dibangun	Telecommuni cations	Desember 2017 diperkirakan selesai pada tahun 2021	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
42	Galaxy Backbone Ict Project	Abuja, Nigeria	USD 100 juta	Sedang Dibangun	Telecommuni cations	Selesai Maret 2019	Export-Import Bank of China
43	Akuisisi Of Eyeverify	Amerika Serikat	USD 70 Juta	Selesai	Merger Dan Akuisisi (M&A)	2016	Ant Financial
44	Akuisisi Of Lazada Group	Singapura	USD 4 Milyar	Selesai	M&A	2016 USD 1 M 2017 USD 1 M 2018 USD 2 M	Alibaba Group
45	Akuisisi Linx Telecommunicatio ns	Amsterdam, Belanda	\ <u>-</u> /	Selesai	M&A	Oktober 2017	Citic Telecom
46	Akuisisi Neul	United Kingdom	USD25 juta	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2014	Huawei Technologies
47	Akuisisi Netas	Turki	USD 101.28 juta	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2016	Zhongxing Technologies (ZTE)
48	Akuisisi Data Artisans	Jerman	USD 103.6 juta	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2019	Alibaba Group
49	Akuisisi Trendyol Group	Turki	USD 728 juta	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2018	Alibaba Group
50	Akuisisi Trustgo	Amerika Serikat	USD 30 juta	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2013	Baidu
51	Akuisisi Hexatier	Israel	USD 42 juta	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2016	Huawei

	Nama Proyek / Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Estimasi Proyek	Status	Tipe Proyek	Tahun	Pengembang
52	Akuisisi Motorola Mobility	Amerika Serikat	USD 2.9 milyar	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2014	Lenovo
53	Akuisisi Hellopay	Singapura	-	Selesai	Merger dan Akuisisi (M&A)	2017	Ant Financial